

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Pengembangan Karir Dosen

Dr. Lukman
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi

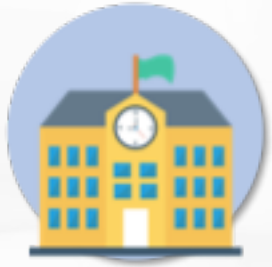
Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Pendidikan Tinggi



1 Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

1. Penguatan & transformasi UT (ICE Institute) dan perluasan MOOCs
2. Peningkatan kapasitas PTN/PTS dan fasilitasi merger PTS kecil
3. Beasiswa berkeadilan dan tepat sasaran (KIP-K)
4. Penguatan dan perluasan penggunaan teknologi untuk pendidikan



2 Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi

1. Akselerasi Perguruan Tinggi Kelas Dunia
2. Peningkatan kemitraan pendidikan tinggi dengan DUDI melalui sinergi *pentahelix*
3. Penguatan ekosistem kampus merdeka (pemenuhan hak mahasiswa utk merdeka belajar & penguatan entrepreneurship



3 Menguatkan Mutu Dosen dan Tendik

1. Penataan system karir
2. Peningkatan profesionalisme
3. Beasiswa dosen & tendik
4. Mobilitas dosen
5. Internship dosen & tendik



4 Menguatkan Sistem Tata Kelola Ditjen Pendidikan Tinggi

1. Penguatan otonomi PT Tata Kelola berbasis data Penguatan pangkalan data Dikti
2. Penguatan kemitraan dan partisipasi DUDI
3. Peningkatan pendanaan Pendidikan tinggi
4. Penguatan pangkalan data Dikti (PD Dikti)



5 Menguatkan Riset, Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Peningkatan mutu Penelitian dan PKM
2. Peningkatan relevansi Penelitian dan PKM
3. Peningkatan kualitas publikasi
4. Penguatan SDM dosen, dosen – merdeka
5. Peningkatan Kerjasama riset dan PKM

Profil Perguruan Tinggi

JUMLAH			
PT	Prodi	Mahasiswa	Dosen
4.437	33.113	9.878.119	331.026

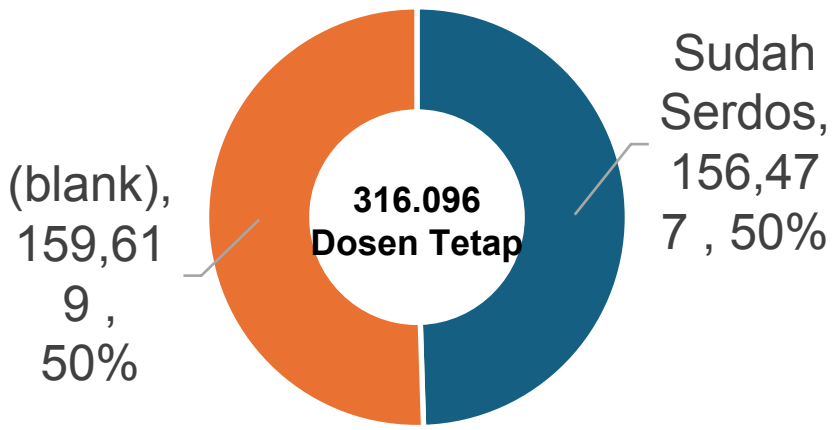
PTN	PT	Prodi	Mahasiswa	Dosen
Kemdikbud	125	7.993	3.642.030	86.675
Kemenag	91	2.316	853.167	22.579
KL Lain	171	968	214.827	11.132
PTS	**PT**	**Prodi**	**Mahasiswa**	**Dosen**
Kemdikbud	2.841	18,117	4.674.889	184.145
Kemenag	1.209	3,719	493.206	26.495

Profil Dosen Berdasarkan Sertifikasi

Jumlah Dosen Tetap Nasional Tahun 2022

Lembaga	Status Pegawai		Dosen Serdos		Jumlah	
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	Dosen Tetap	Dosen Serdos
PTKL	10.033	1.333	5.762	225	11.366	5.987
PTS	7.289	165.541	6.026	71.640	172.830	77.666
PTA	15.889	29.207	5.721	3.816	45.096	9.537
PTN	69.975	16.829	55.463	7.824	86.804	63.287
Grand Total	**103.186**	**212.910**	**72.972**	**83.505**	**316.096**	**156.477**

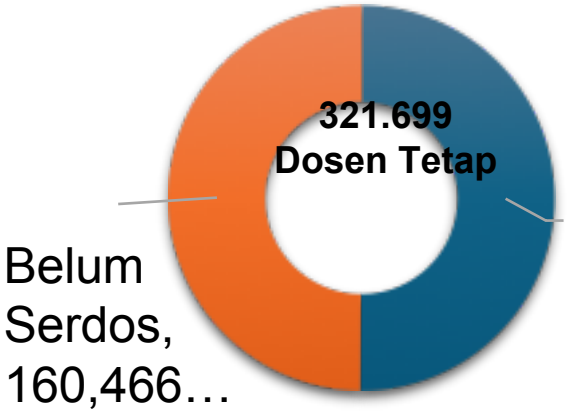
Dosen Tersertifikasi Nasional Tahun 2022



Jumlah Dosen Tetap Nasional Tahun 2023

Lembaga	Status Pegawai		Dosen Serdos		Jumlah	
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	Dosen Tetap	Dosen Serdos
PTKL	10.174	1.608	6.268	230	11.782	6.498
PTS	6.855	167.336	5.854	74.230	174.191	80.084
PTA	18.048	29.402	6.723	3.668	47.450	10.391
PTN	72.180	16.096	56.777	7.483	88.276	64.260
Grand Total	**107.257**	**214.442**	**75.622**	**85.611**	**321.699**	**161.233**

Dosen Tersertifikasi Nasional Tahun 2023



Jumlah Dosen Tetap Nasional Tahun 2024

Jabatan	Jumlah
Asisten Ahli	86.540
Lektor	116.724
Lektor Kepala	32.744
Guru Besar	11.051
Tanpa Jabatan	84.581
Total	331.640

Kuota Serdos 2024 10.000

Yang Belum mendapat Serdos 160.407

Profil Dosen Berdasarkan Jabatan Akademik

Jabatan	2022	2023	2024 (1 Juli)	%
Asisten Ahli	94.352	87.408	86.540	26.1
Lektor	99.715	118.313	116.724	35.2
Lektor Kepala	32.696	34.774	32.744	9.87
Profesor	7.567	11.113	11.051	3.33
Tidak Berjafung	81.766	70.091	84.581	25.5
Grand Total	**316.096**	**321,699**	**331.640**	**100**

Profil Dosen ITS Berdasarkan Jabatan Akademik

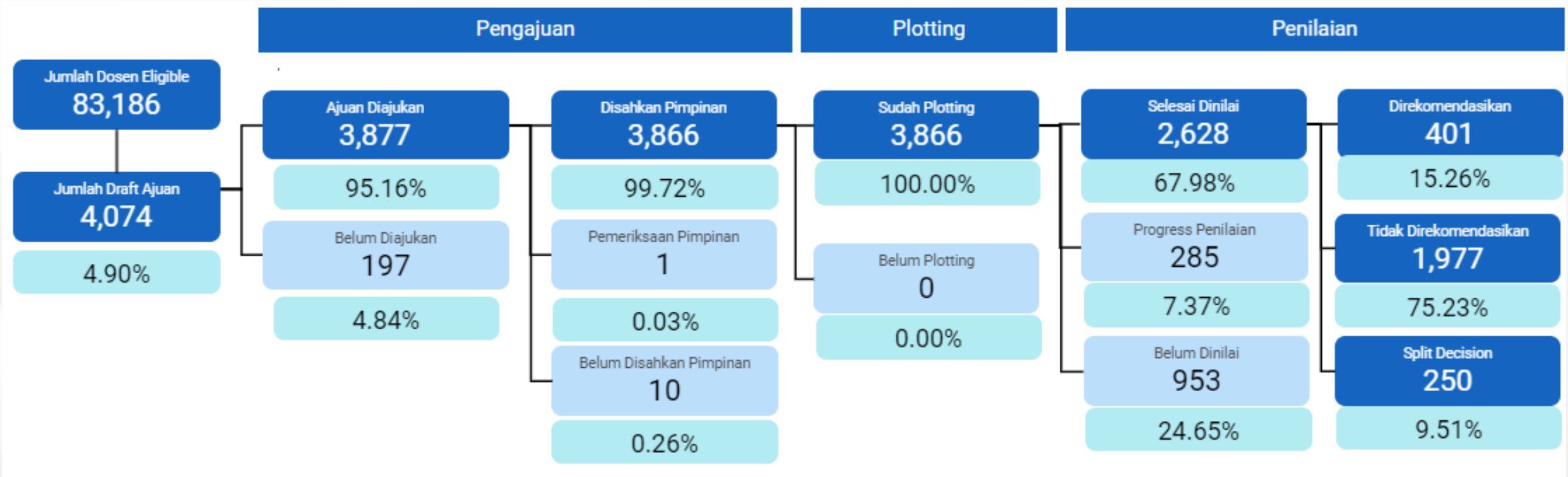
2023/2024			
Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
180	421	227	168

2022/2023			
Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
178	474	233	140

2021/2022			
Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
230	427	241	122

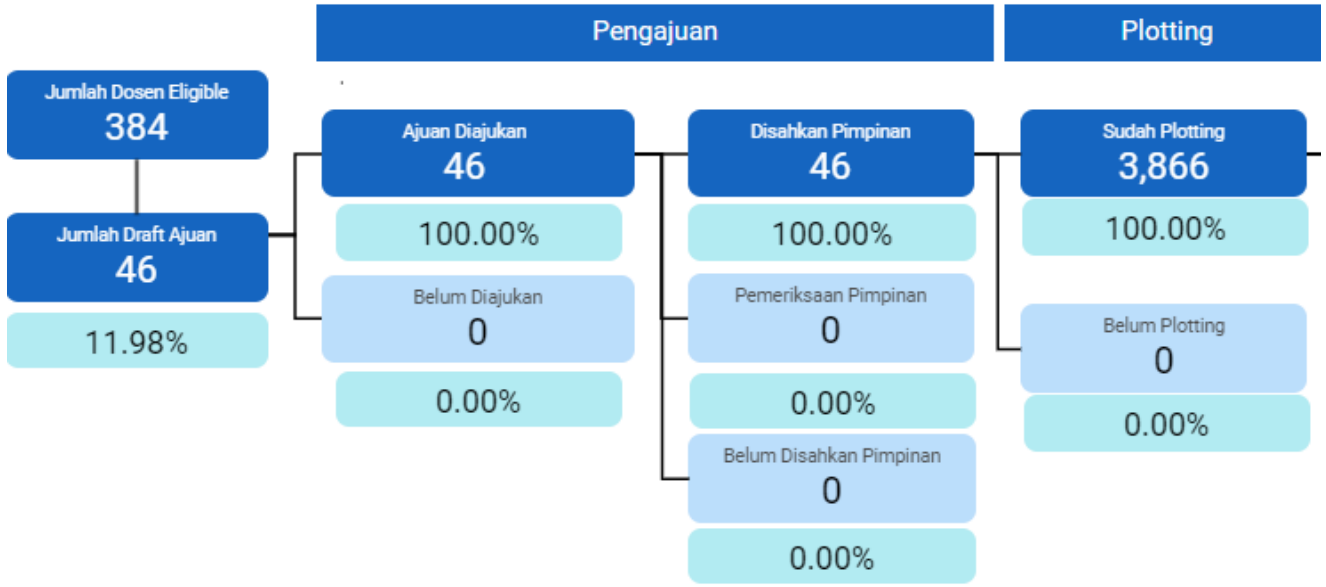
2020/2021			
Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
233	412	236	112

Usulan Kenaikan Jabatan Nasional



Usulan Kenaikan Jabatan Periode 1 ITS

Total



Profesor



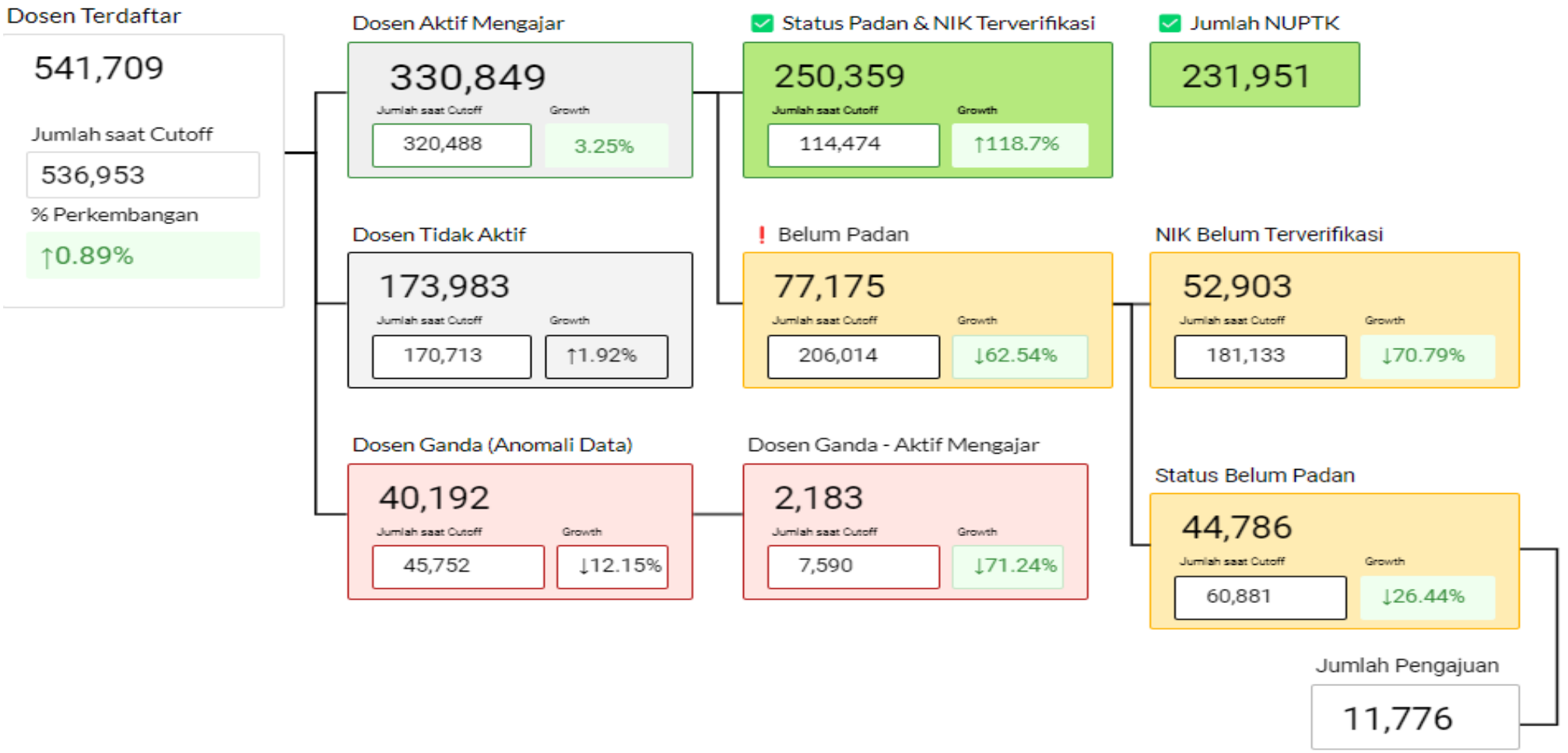
Lektor Kepala



Grafik Progres Sosialisasi Pemadanan

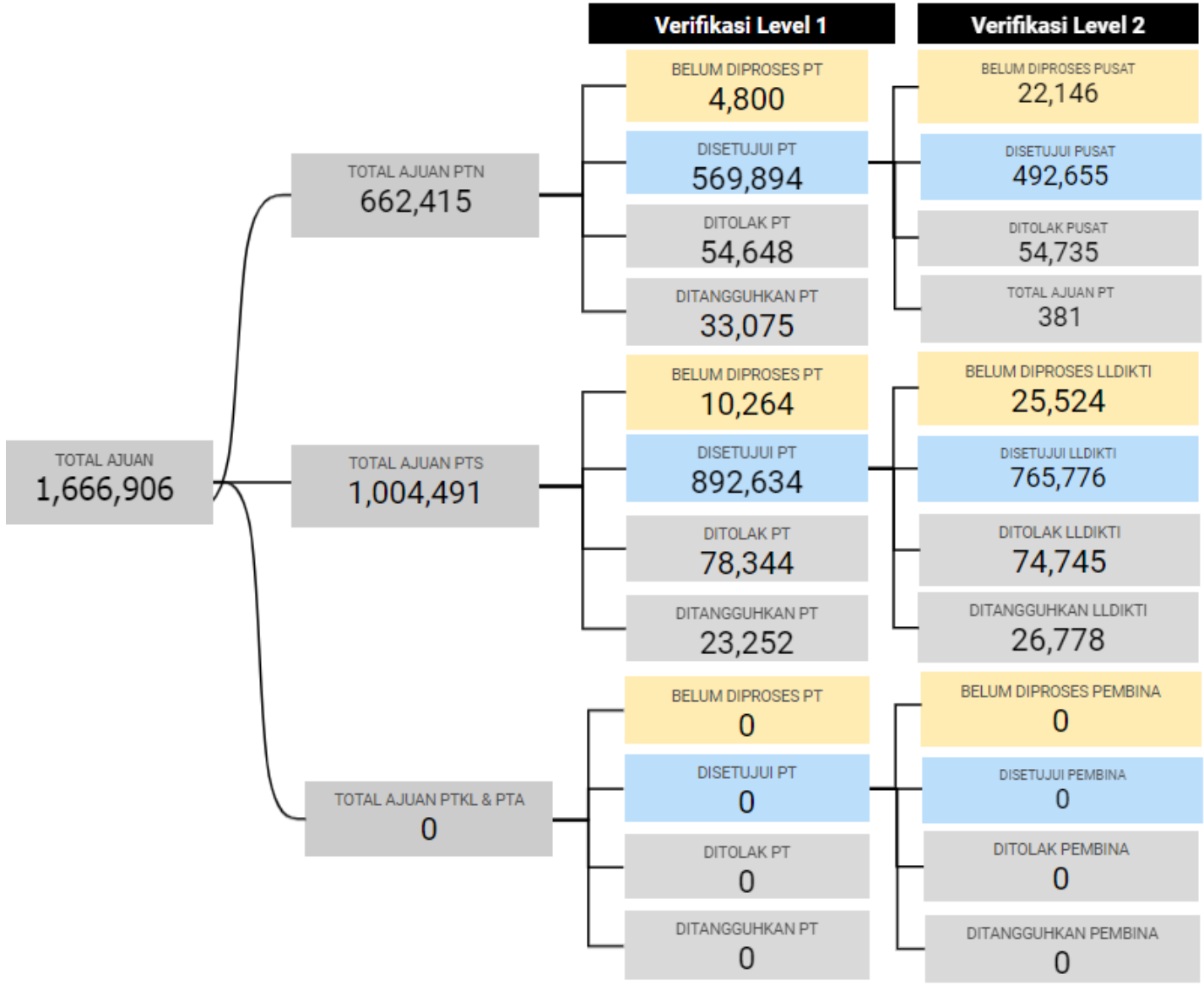
⚠ Kamus Data pada Grafik

1. Dosen Aktif Mengajar adalah dosen yang memiliki keaktifan pengajaran pada tahun ajar 2023
   A. Status Padan & NIK Terverifikasi, adalah jumlah dosen yang siap diterbitkan NUPTK dan dilakukan pengecekan dengan GTK oleh Pusdatin
   B. Belum Padan, adalah jumlah dosen yang perlu melakukan pemadanan status dosen, dan (atau), verifikasi NIK
2. Tidak Aktif Mengajar adalah jumlah dosen yang tidak aktif mengajar dan tidak ada keaktifan PTK di tahun ajar 2023. Dosen-dosen ini tidak perlu memadankan data nya
3. Dosen Ganda adalah jumlah dosen yang terindikasi ganda secara NIK, NIP, dan Nomor Registrasi (NIDN, NIDK, NUP). Dosen-dosen ini dianggap anomali dan belum ikut sosialiasi pemadanan



Data per 8 Agustus 2024

Segmentasi Hasil PDD berdasarkan Tipe PT Akademik Kemendikbudristek



PTN

% DISETUJUI PUSAT
0.69

PTS

% DISETUJUI PUSAT
0.72

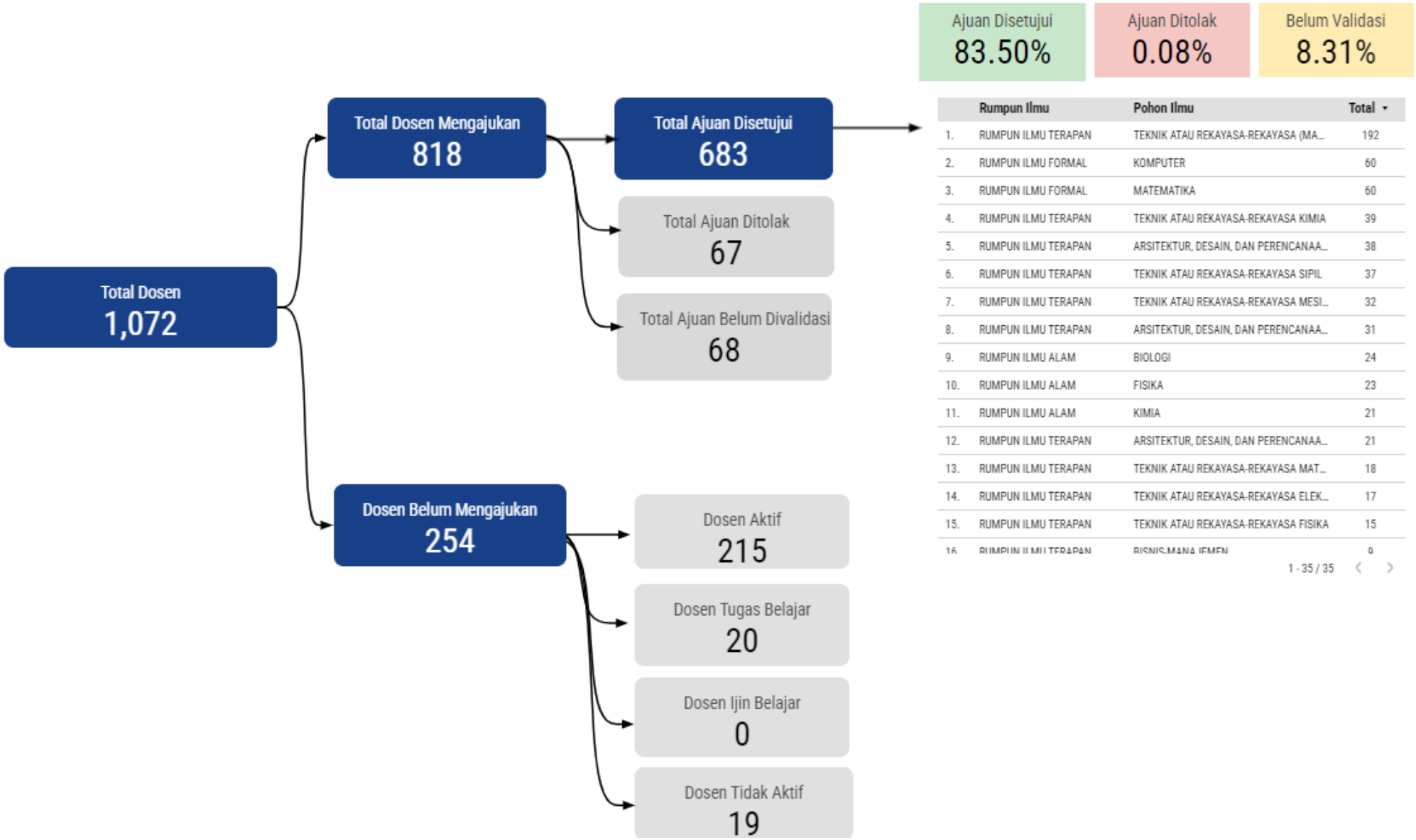
PTKL & PTA

% DISETUJUI PEMBINA
No data

Per Pembina

	pt_jenis	pembina	Jumlah Dosen Padan	Jumlah Dosen Belum Padan
1.	PTS_LL...	LLDIKTI I	9,929	2,388
2.	PTS_LL...	LLDIKTI II	7,436	1,422
3.	PTS_LL...	LLDIKTI III	20,500	7,122
4.	PTS_LL...	LLDIKTI IV	24,155	7,169
5.	PTS_LL...	LLDIKTI IX	11,344	2,685
6.	PTS_LL...	LLDIKTI V	7,226	1,016
7.	PTS_LL...	LLDIKTI VI	13,240	2,099
8.	PTS_LL...	LLDIKTI VII	19,311	3,065
9.	PTS_LL...	LLDIKTI ...	7,225	695
1...	PTS_LL...	LLDIKTI X	9,620	1,312
1...	PTS_LL...	LLDIKTI XI	5,782	2,054
1...	PTS_LL...	LLDIKTI XII	1,504	983
1...	PTS_LL...	LLDIKTI ...	2,675	758
1...	PTS_LL...	LLDIKTI ...	2,067	567
1...	PTS_LL...	LLDIKTI ...	2,412	758
1...	PTS_LL...	LLDIKTI ...	3,352	998

Total Ajuan Rumpun Ilmu ITS



	Rumpun Ilmu	Pohon Ilmu	Total
1.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA (MA...	192
2.	RUMPUN ILMU FORMAL	KOMPUTER	60
3.	RUMPUN ILMU FORMAL	MATEMATIKA	60
4.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA KIMIA	39
5.	RUMPUN ILMU TERAPAN	ARSITEKTUR, DESAIN, DAN PERENCANAA...	38
6.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA SIPIL	37
7.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA MESI...	32
8.	RUMPUN ILMU TERAPAN	ARSITEKTUR, DESAIN, DAN PERENCANAA...	31
9.	RUMPUN ILMU ALAM	BIOLOGI	24
10.	RUMPUN ILMU ALAM	FISIKA	23
11.	RUMPUN ILMU ALAM	KIMIA	21
12.	RUMPUN ILMU TERAPAN	ARSITEKTUR, DESAIN, DAN PERENCANAA...	21
13.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA MAT...	18
14.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA ELEK...	17
15.	RUMPUN ILMU TERAPAN	TEKNIK ATAU REKAYASA-REKAYASA FISIKA	15
16.	RUMPUN ILMU TERAPAN	BISNIS-MANAJEMEN	9

1 - 35 / 35

Monitoring AK Konversi

Pembina	Jumlah Instansi	Jumlah PT	Jumlah Dosen
PTN	1	124	10,657
KL/PTA	22	161	1,851
LLDIKTI	16	368	1,060
Grand total	39	653	13,568

Data per 17 Juli 2024

Profesor adalah pemimpin pendidikan dan pengembangan Iptek (Pasal 8 dan 9 UU 12/2012

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang **profesor** dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 10

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

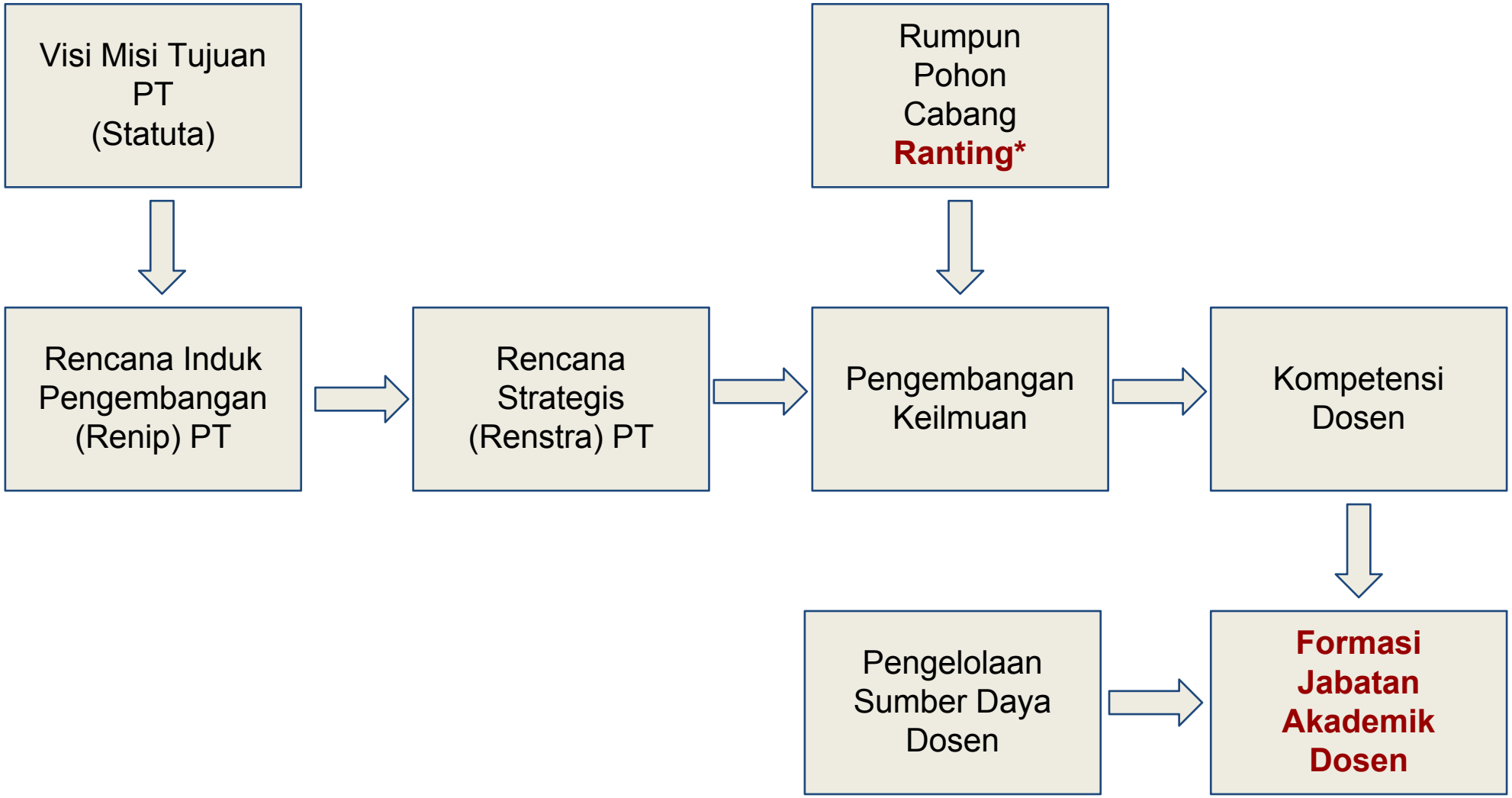
(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rumpun ilmu agama;
b. rumpun ilmu humaniora;
c. rumpun ilmu sosial;
d. rumpun ilmu alam;
e. rumpun ilmu formal; dan
f. rumpun ilmu terapan.

(3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Penjelasan Pasal 10, Ayat 2, huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Pola pikir penyusunan Formasi Jabatan Akademik Dosen di PT



Latar Belakang Pengumpulan Data Dosen

Pengumpulan data dan kemudahan layanan kenaikan jabatan

- Saat ini kementerian belum mempunyai data utuh mengenai keilmuan Dosen
- Dimana keilmuan ini digunakan oleh Kementerian untuk:
  - Membantu Dosen yang akan diajukan kenaikan jabatan akademik nya bisa dinilai dan diperiksa oleh Profesor (Asesor Nasional) di kelompok yang tepat
  - Memastikan Dosen bisa dibina sesuai keilmuan
- Apakah ini artinya pemerintah akan membelenggu perkembangan ilmu Dosen?
  - TIDAK
    - Pengelompokan ini bukan untuk menutup ruang kolaborasi atau pengembangan
  - Apakah kepakaran dibatasi? TIDAK
    - Tapi tentunya ada landasan ilmu yang mendukung interdisiplin
- Kenaikan jabatan akademik ini ditentukan oleh Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan dan pengembangan ilmu di Perguruan Tinggi

Linimasa Regulasi Dosen

Dosen PNS

Permenpanrb 17/2013
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Dosen PNS

Permenpanrb 01/2023
tentang Jabatan Fungsional

Permendikbud 92/2014
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

Semua Dosen

Pengaturan AK Integrasi
- Perdirjendikti 114/E/KPT/2023
- Perdirjendikti 171/E/KPT/2023

Dosen PNS

Fokus Saat Ini

Semua Dosen

Pemadanan Data Dosen
(Mei - Agustus 2024)
- Permendikbud 31/2022
- Kepmendikbud 133/M2022

Kenaikan Jabatan Akademik
(Juni - November 2024)
- Permendikbud 92/2014
- PermenpanRB 6/2022
- PermenpanRB 1/2023
- PerkaBKN 3/2023
- SK Dirjen 0502/E.E4/ RHS/DT.04.01/2024

Periode: Juni - November 2024

Linimasa Promosi LK & GB
- **28 Mei - 28 Juni** proses persiapan dan penilaian oleh PT Periode I
- **13 - 30 Juni**: Pembukaan pengajuan usulan Periode I di SISTER (LK & GB)
- **1 - 12 Juli**: Persetujuan pimpinan PT/LLDIKTI/KL di SISTER
- **13 Juli - 30 Agustus**: Penilaian Usulan Periode I
- **September 2024**: Pembukaan pengajuan usulan Periode II
- **Oktober - November 2024**: Penilaian Usulan Periode II

Regulasi Pengaturan Dosen Baru Terbit
- Permendikbud Dosen
- Permenpanrb JF Dosen

Semua Dosen

Catatan: implementasi penuh mulai 1 Januari 2025 untuk semua PT

Apa yang bisa diperoleh dari diseminasi proses masa peralihan?

Secara Umum

- Peningkatan fitur pemutakhiran data Dosen untuk memastikan proses kenaikan jabatan akademik Dosen
- Simplifikasi proses kenaikan jabatan akademik Dosen yang sudah sesuai dengan peraturan Permendikbud 92/2014 dan PermenpanRB 1/2023
- Penekanan pada penilaian kualitas kinerja Dosen dalam kenaikan jabatan akademik Dosen

Perguruan Tinggi

- Membantu PT dalam memutakhirkan data Dosen dengan mudah
- Membantu PT dalam membuat dokumen AK Konversi dengan lebih mudah sesuai aturan PerBKN 3 tahun 2023 untuk Dosen PNS
- PT bisa memproses promosi Dosen dengan langkah yang lebih sederhana dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu SISTER
- PT bisa memonitor dan menindaklanjuti proses promosi kenaikan jabatan akademik Dosen

Dosen

- Dosen bisa memutakhirkan data untuk memastikan bisa menggunakan layanan kenaikan jabatan Dosen
  - Data profil
  - Data rumpun ilmu
- Dosen bisa mendapatkan informasi progres promosi jabatan akademik yang dilakukan oleh PT dalam SISTER

Poin-poin pengaturan

Pemutakhiran Data Dosen

1. Pemutakhiran data nomor induk kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil);
2. Pemutakhiran data status kepegawaian dan ikatan kerja dosen;
3. Pemutakhiran data jabatan akademik dosen; dan
4. Pemutakhiran data rumpun ilmu.

Landasan Hukum (1/2)

UU Guru Dosen 14/2005 & UU Pendidikan Tinggi 12/2012

Definisi Dosen

UU Guru Dosen 14/2005

- **Pasal 1 ayat (2):** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **Pasal 1 ayat (3):** Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- **Pasal 45:** Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Satu Data

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Permendikbud 31/2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- **Pasal 1 ayat (2):** Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- **Pasal 3 ayat (2) :** Data pendidikan meliputi:

Data Pendidikan	1. Satuan Pendidikan 2. Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan 3. Peserta Didik **4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan** 5. Sumber Daya Pendidikan 6. Substansi Pendidikan 7. Capaian Pendidikan

Landasan Hukum (2/2)

Satu Data

Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, Dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi

Kategori data induk berdasarkan nomenklatur Kepmen
Data Induk Perguruan Tinggi
Data Induk Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
Data Induk Program Studi
Data Induk Peserta Didik
Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan **(fokus)**

Satu Data

NUPTK

5. Kode Referensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   a. Kode referensi pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan kode referensi berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan.
   b. Pemberian NUPTK dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) pendidik dan tenaga kependidikan hanya dapat memiliki 1 (satu) kode referensi.
   c. NUPTK diberikan dalam format 16 (enam belas) digit, terdiri atas angka yang tersusun secara acak.

Sebelum	Sesudah
NIDN	NUPTK (masing-masing PTK mempunyai nomor unik)
NIDK	
NUP	
NITK	

Pengelompokkan Dosen

Status Dosen	Status Kepegawaian	Ikatan Kerja	Status Kewajiban (Kinerja)
Dosen Tetap	PNS JF Dosen	Tetap di PT sebagai Unit Kerja Pemerintah	Tridharma Penuh
	PPPK JF Dosen	Tetap di PT sebagai Unit Kerja Pemerintah	Tridharma Penuh
	Pegawai Tetap Perguruan Tinggi	Tetap di PT / Badan Penyelenggara (tetap sampai pensiun / waktu tertentu)	Tridharma Penuh
Dosen Tidak Tetap	Pegawai Tidak Tetap Perguruan Tinggi	Tidak Tetap di PT tertentu	Tridharma Paruh Waktu
Pengajar Nondosen	Pengajar	Mengajar	Tidak mempunyai jabatan akademik
	Instruktur	Mengajar	Tidak mempunyai jabatan akademik
	Tutor	Mengajar	Tidak mempunyai jabatan akademik

Status Dosen	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap	Pengajar Nondosen
Deskripsi	Dosen yang bekerja dengan perjanjian kerja bersifat penuh waktu pada Perguruan Tinggi.	Dosen yang bekerja dengan perjanjian kerja bersifat paruh waktu pada Perguruan Tinggi.	Pengajar yang mengajar di Perguruan Tinggi.
Kualifikasi Akademik	Magister atau Doktor atau disetarakan.	Magister atau Doktor atau disetarakan.	Sarjana atau Magister atau Doktor.
Kompetensi	Memenuhi kompetensi dosen di Jabatan Akademik tertentu.	Memenuhi kompetensi dosen di Jabatan Akademik tertentu.	Tidak perlu memenuhi kompetensi dosen.
Sertifikat Pendidik	Berhak selama memenuhi syarat.	Berhak selama memenuhi syarat.	Tidak berhak.
Sehat Jasmani dan Rohani	Memenuhi.	Memenuhi.	Memenuhi.
Kualifikasi yang disyaratkan PT tempat bertugas	Memenuhi.	Memenuhi.	Memenuhi.
Ikatan Kerja sebagai Dosen	Penuh waktu (tetap atau waktu tertentu).	Paruh waktu.	Penuh waktu/paruh waktu.
Instansi Kepegawaian	Perguruan tinggi.	Instansi lain selain perguruan tinggi.	Perguruan tinggi atau instansi lain selain perguruan tinggi.
Status Kewajiban Tridharma	Melaksanakan tridharma secara penuh (12-16 sks).	Tidak melaksanakan tridharma secara penuh (< 12 sks), namun bisa melaksanakan tridharma lain seperti penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.	Hanya bisa mengajar, meskipun mungkin ada keinginan meneliti dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
Tugas Tambahan	Bisa mendapatkan tugas tambahan (contoh: kepala lembaga dll).	Bisa mendapatkan tugas tambahan (contoh: kepala lembaga dll).	Tidak bisa mendapatkan tugas tambahan.
Jabatan Akademik	Mempunyai jabatan akademik (selama aktif sebagai dosen).	Mempunyai jabatan akademik jika memenuhi kompetensi (berlaku hanya jika masih aktif sebagai dosen).	Tidak mempunyai jabatan akademik.
Kode Etik	Terikat kode etik dosen.	Terikat kode etik dosen.	Terikat terbatas sejauh terkait dengan pengajaran di perguruan tinggi.
Pengembangan Karier Jabatan Akademik	Berhak mendapatkan pengembangan karier oleh perguruan tinggi.	Berhak mendapatkan pengembangan karier sesuai dengan perjanjian dan kebutuhan perguruan tinggi	Sesuai wewenang perguruan tinggi.
Tunjangan Profesi, Kehormatan	Dibayar dengan APBN Pendidikan.	Tanggungan Instansi kepegawaian (tidak menggunakan APBN fungsi pendidikan)	Tidak mendapatkan.

Pemilihan Bidang Ilmu

Rumpun Ilmu - Landasan Hukum

UU 12/2012

[Pasal 10]

(1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- (a) rumpun ilmu agama;
- (b) rumpun ilmu humaniora;
- (c) rumpun ilmu sosial;
- (d) rumpun ilmu alam;
- (e) rumpun ilmu formal; dan
- (f) rumpun ilmu terapan.

(3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Kepdirjen

- Kepdirjen Dikti 163/E/KPT/2022 - link
- Kepdirjen Diksi NOMOR 27 /D /M/2022 - link

Pengisian Rumpun Ilmu di SISTER

Penerapan isian rumpun ilmu di SISTER diperuntukkan untuk pengisian profil Dosen, terciptanya tata kelola data dan memberikan acuan pelaksanaan layanan yang tepat.

Pengisian rumpun ilmu Dosen akan digunakan sebagai dasar pengelolaan layanan yang terintegrasi kedepannya, antara lain:

1. Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD);
2. Penilaian Sertifikasi Dosen (Serdos);
3. Penilaian Angka Kredit (PAK); dan
4. Sebagai dasar penugasan asesor dan penilai agar terdapat relevansi dan pemahaman substansi terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh Dosen terkait.

Pengisian rumpun ilmu dilakukan Dosen secara mandiri dengan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan:

1. Wajib mengisi di level **rumpun ilmu** dan **pohon ilmu**. Untuk cabang ilmu bersifat opsional.
2. Dihimbau untuk mengisi Rumpun, Pohon dan Cabang ilmu sesuai atau yang terdekat dengan **Pendidikan terakhir (S2 atau S3)** sesuai dengan ijazah. Dihimbau untuk tidak berdasarkan penugasan atau program studi saat ini.

Catatan: Rujukan pemetaan rumpun ilmu saat ini menggunakan Kepdirjen Dikti dan Diksi yang sudah dikeluarkan, pemetaan ini bersifat iteratif dan akan terus dikembangkan

Penyesuaian Pengelolaan Kinerja dan Karier Pasca-PermenPanRB 1/2023



Pembentukkan BKD & SKP: Pemberian Predikat Kinerja SKP berdasarkan BKD

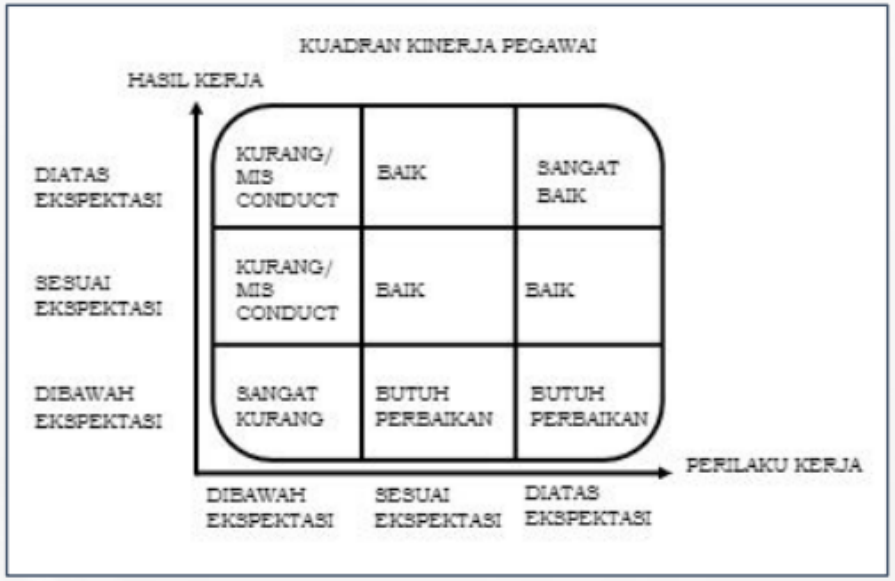
Rekomendasi penilaian predikat kinerja 2023

Capaian Hasil Kerja (SKS)	Kriteria PO BKD 2021	Pemberian predikat kinerja sesuai hasil BKD
>16 SKS	M	Diberikan **Sangat Baik / Baik / Butuh Perbaikan (Cukup)*** *dapat ditentukan tergantung **gradasi kualitas kinerja** sesuai penilaian dari atasan PT
12 sd 16 SKS (batas UU)	M	
<12 SKS	TM	Kurang / Sangat Kurang

- Penilaian di tabel diatas adalah untuk Dosen Tetap Penuh Waktu
- Untuk Dosen dengan tugas tambahan capaian SKS sesuai peraturan yang berlaku (minimal 3 SKS) dan dapat memperoleh predikat kinerja: Sangat Baik / Baik / Butuh Perbaikan (Cukup)

Penilaian SKP

- Dokumen SKP adalah dokumen penilaian kinerja dan perilaku kinerja
  - Kinerja Dosen adalah hasil BKD Dosen
  - Perilaku Kinerja Dosen dinilai oleh pimpinan sesuai PermenpanRB 6 tahun 2022
- Pemberian predikat akhir dapat dilakukan sesuai dengan kuadran kinerja pegawai sesuai dengan PermenpanRB 6 tahun 2022:



Pengisian PAK Konversi untuk Dosen PNS:
Formulir 1

- **Bagaimana contoh pengisian formulir konversi predikat kinerja ke angka kredit?**

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT
NOMOR .....

Instansi : **Badan Kepegawaian Negara** Periode: **Januari - Maret 2023**

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI		
1	Nama	: Xxxxxxxxxxxxxx
2	NIP	: Xxxxxxxxxxxxxx
3	Nomor Seri Karpeg	: Xxxxxxxxxxxxxx
4	Tempat/Tgl. Lahir	: Xxxxxxxxxxxxxx
5	Jenis Kelamin	: Xxxxxxxxxxxxxx
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	: **Penata Muda, III/a**
7	Jabatan/TMT	: Xxxxxxxxx, Ahli Pertama III/b
8	Unit Kerja	: Xxxxxxxxxxxxxx
9	Instansi	: Xxxxxxxxxxxxxx

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x kolom 3)
1	2	3	4
Baik	100%	**12,5**	12,5

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada:
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

Persentase Predikat Kinerja x Koefisien Angka Kredit Tahunan

TABEL PERSENTASE PREDIKAT

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

TABEL KOEFISIEN AK

Jenjang Jabatan	Koefisien AK
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75

Untuk JF Dosen, bisa diisi dengan AK Konversi tahunan 2023. Sehingga persentase koefisien adalah 100%.

Catatan: untuk masa peralihan ini Kemendikbud belum mengatur penyusunan PAK Konversi secara periodik selain 1 tahun, pembuatan masih per tahun

Sumber: Panduan Teknis PerBKN 3/2023

Pengisian PAK Konversi untuk Dosen PNS:
Formulir 2

- **Bagaimana contoh pengisian formulir akumulasi angka kredit?**

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	:	Xxxxxxxxxxxxxxx
2	NIP	:	Xxxxxxxxxxxxxxx
3	Nomor Seri KARPEG	:	Xxxxxxxxxxxxxxx
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	Xxxxxxxxxxxxxxx
5	Jenis Kelamin	:	Xxxxxxxxxxxxxxx
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	**Penata Muda, III/b**
7	Jabatan/TMT	:	**Xxxxxxxxx, Ahli Pertama**
8	Unit Kerja	:	Xxxxxxxxxxxxxxx
9	Instansi	:	Xxxxxxxxxxxxxxx

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

MASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2022	AK Integrasi	-	-		**46,875**
2023	Januari - Maret	**Baik**	100%	**12,5**	12,5
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					59,375

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada:
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

AK Integrasi juga diperhitungkan dalam perolehan AK terakhir. Dapat memasukkan jumlah akhir AK Integrasi

AK Konversi 2023 sesuai formulir 1

Perolehan AK Total yang diperoleh merupakan penjumlahan AK Integrasi & Konversi 2023, dan yang akan digunakan seterusnya secara kumulatif di Formulir 3

Sumber: Panduan Teknis PerBKN 3/2023

Pengisian PAK Konversi untuk Dosen PNS:
Formulir 3

- **Bagaimana contoh pengisian formulir penetapan angka kredit konversi?**

Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	0

AK Konversi di **kolom "Lama"** diisi sesuai AK Dasar berdasarkan pangkat Dosen ybs.

Contoh: Dosen pangkat IVc, AK Lama perlu diisi "300"

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	Xxxxxxxxxxxxxx
2	NIP	Xxxxxxxxxxxxxx
3	Nomor Seri KARPEG	Xxxxxxxxxxxxxx
4	Tempat/Tgl. Lahir	Xxxxxxxxxxxxxx
5	Jenis Kelamin	Xxxxxxxxxxxxxx
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda, III/b
7	Jabatan/TMT	Xxxxxxxxx, Ahli Pertama
8	Unit Kerja	Xxxxxxxxxxxxxx

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi	0	59,375	59,375	
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	..... **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF		0	59,375	59,375	
Keterangan		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		50		100	
~~Kelebihan/ Kekurangan~~*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		9,375		41,625	
~~Kelebihan/~~ Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ..... JENJANG .....PANGKAT/GOLONGAN RUANG .....

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Ditetapkan di .....
~~Pada tanggal~~ .....
Pejabat Penilai Kinerja .....

Nama Lengkap
NIP. .....

*) coret yang tidak perlu
**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

AK Konversi di **kolom "Baru"** diisi dengan total perolehan AK, dikurangi kolom "Lama"

Diisi Sesuai syarat AK untuk menduduki golongan saat ini, III/a adalah golongan awal pada jenjang ahli pertama maka kebutuhan menduduki III/a adalah 0

Diperoleh dari jumlah angka kredit yang dimiliki dikurang angka kredit pada kolom lama

Diperoleh dari Jumlah AK Kumulatif dikurangi Kebutuhan kenaikan Jenjang Jabatan

Diperoleh dari jumlah AK kolom Baru dikurang kebutuhan kenaikan pangkat

Ditandatangani oleh **Dekan Fakultas (Akademik) atau Direktur/Wadir SDM Politeknik (Vokasi) / Ketua Lembaga LLDIKTI / Biro SDM KL - Pusbang KL.** Jika Dekan/Wadir, maka ditandatangani oleh Rektor/Direktur.

Untuk PNS DPK, ditandatangani oleh Kepala Lembaga LLDIKTI.

Sumber: Panduan Teknis PerBKN 3/2023

Pengisian Formasi Jabatan Akademik Dosen

[Didahului dengan batang tubuh SK Pemimpin PT sesuai dengan tata naskah dinas PT]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN
PADA
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/
AKADEMI KOMUNITAS ... TAHUN 2024-2028

DAFTAR FORMASI JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI KOMUNITAS ...
TAHUN 2024-2028

I. PROGRAM STUDI ...

A. Formasi dan Kebutuhan Jabatan Akademik Dosen

Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	1 Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028			
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1				
A2				
Jumlah Jabatan Akademik				

B. Formasi Jabatan Akademik Dosen yang Terisi dan Tersedia Tahun 2024

4 Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran (Kebutuhan Pengembangan Keilmuan)	2 Formasi Jabatan Akademik Terisi Saat Ini 2024					3 Jabatan Akademik Tersedia 2024				
	Belum ada Jabatan Akademik	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar		Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
A1										
A2										
Jumlah Dosen Saat Ini						Jumlah Tersedia				

Demikian surat formasi jabatan akademik dosen ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20.....
Pimpinan Perguruan Tinggi

.....
NIP. .....

1 Kolom **'Formasi Jabatan Akademik 2024 - 2028"** diisi dengan jumlah formasi jabatan 5 (lima) tahunan sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.

2 Kolom **"Formasi Jabatan Akademik Terisi Saat Ini"** diisi dengan jumlah dosen yang menempati formasi jabatan akademik dosen.

3 Kolom **"Jabatan Akademik Tersedia"** diisi dengan jumlah formasi Dosen yang tersedia di setiap jenjang akademik dosen.

4 Kolom **"Bidang Ilmu Penugasan/Kepakaran"** diisi sampai level Bidang Ilmu (A), pengembangan bidang ilmu (A1) atau dibawahnya (A1.1, A1.1.1 dan seterusnya) selama sesuai kebutuhan bidang ilmu di Perguruan Tinggi.

Catatan: untuk setiap rumpun - pohon - cabang - ranting di setiap formasi untuk pengembangan ilmu hanya dapat diisi oleh 1 Profesor.

Kebijakan pengembangan jumlah Formasi Jabatan Akademik Dosen di PT

Apakah yang membatasi kebijakan pengembangan jumlah formasi jabatan akademik Dosen di PT

- Kebijakan PT (Renip, Rentra dan V,M dan T) antara lain cakupan keilmuan, anggaran dan infrastruktur.
- Kapasitas dan kompetensi SDM setiap bidang keilmuan di PT untuk mengembangkan pohon hingga ranting sesuai dengan rumpun keilmuan yang ada pada Undang-Undang Dikti.
- Catatan: **bagian terkecil yang dapat dipimpin oleh seorang profesor sebagai pemegang kewenangan kebebasan mimbar akademik maupun kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dapat terdiri dari 1 Lektor Kepala, 1 Lektor dan 1 Asisten Ahli.**

Contoh catatan

Contoh catatan untuk bagian tertentu Ilmu Hukum kepada cabang Hukum Bisnis dengan ranting-rantingnya (cuplikan dari diskusi dengan KaSA-UGM, tgl 7 Juni 2014 di Workshop JAD SA-UGM)

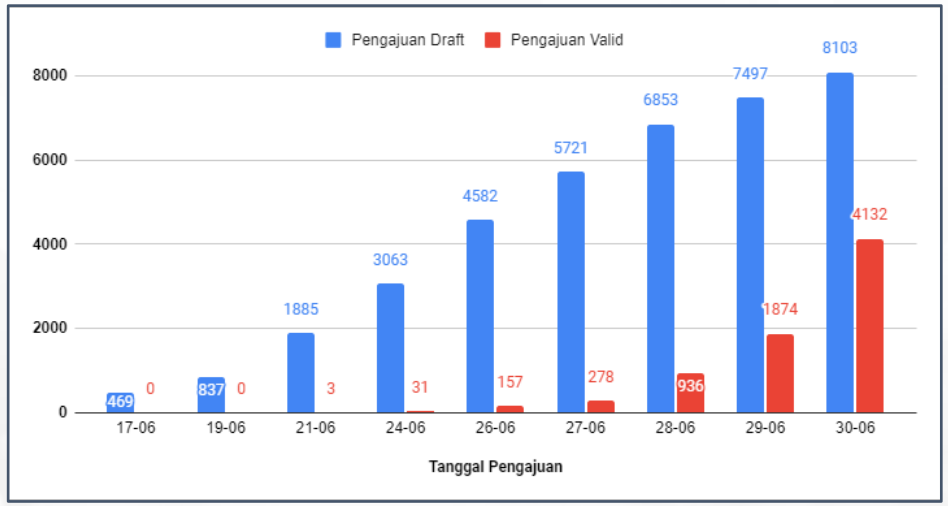
—-

Rumpun Ilmu	Ilmu Terapan	
Pohon Ilmu	Hukum	
Cabang Ilmu	Hukum Bisnis	Bisa diisi formasi
Ranting Ilmu	Hukum Perusahaan Hukum Pasar Modal Hukum Perbankan Hukum HAKI Hukum Asuransi Hukum Persaingan Usaha Hukum Perdagangan Internasional Hukum Kontrak Komersial Internasional	Diisi dalam formasi jabatan akademik untuk pengusulan Guru Besar (GB)

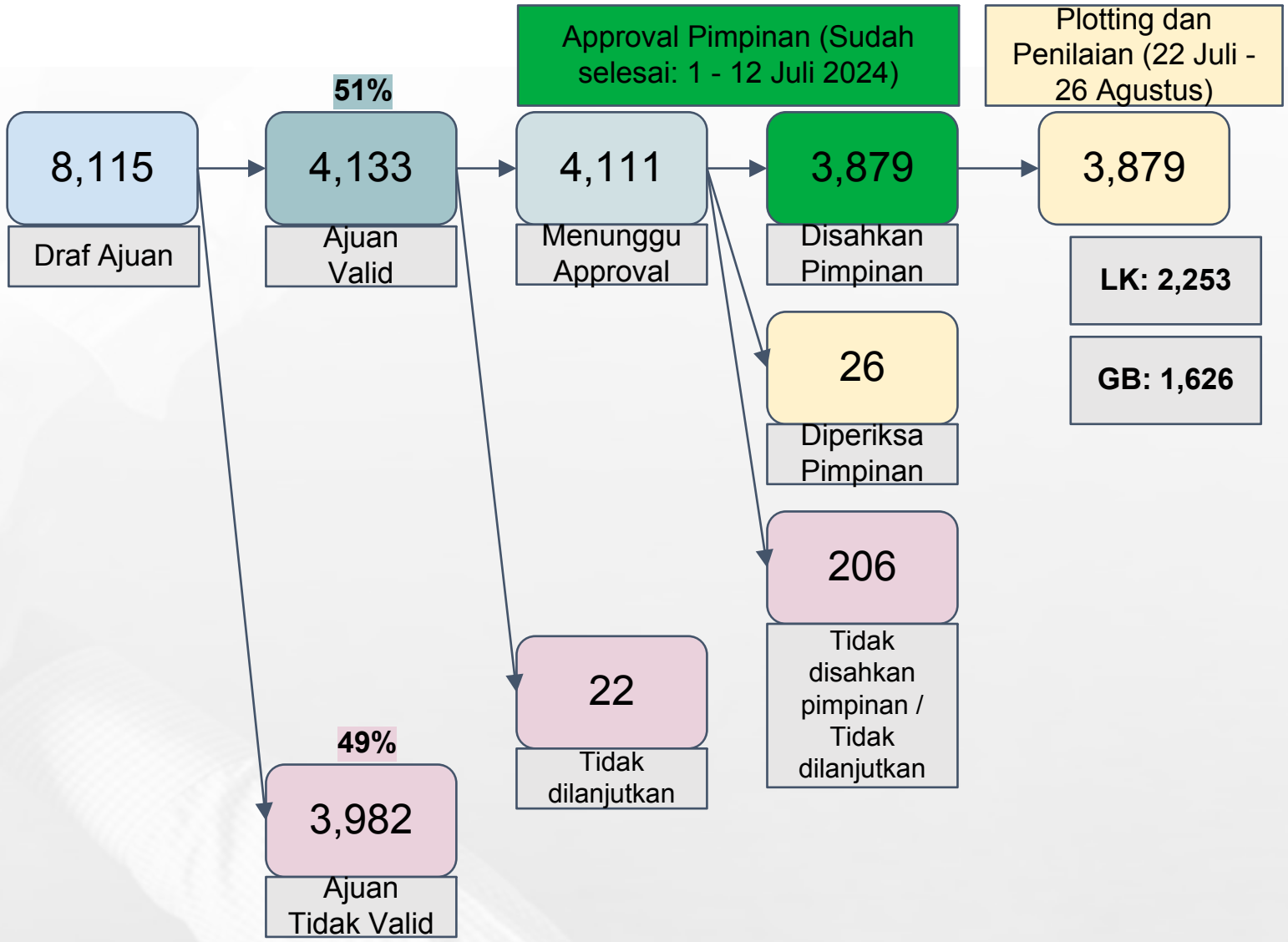
Linimasa Kenaikan Jenjang Akademik Dosen Tahun 2024

No	Tanggal	Kegiatan
1	**1 - 12 Juli 2024**	Pengesahan pimpinan PT / LLDIKTI/ KL di SISTER
2	**2 - 12 Juli 2024**	• Finalisasi nama Asesor + Pengelompokkan Asesor • Menyusun NIRA + Pengelompokkan Ajuan • Finalisasi bahan paparan penyamaan persepsi
3	**15 - 19 Juli 2024**	• Mapping Asesor dan Plotting (ajuan dengan asesor) melalui SISTER • Asesor menyetujui / mengambil ajuan yang akan dinilai (konfirmasi)
4	**19 Juli 2024**	**Persiapan Bimtek**
5	**22 Juli 2024**	**Sistem Penilaian oleh Asesor mulai dibuka di SISTER**
6	**22 - 23 Juli 2024**	**[BIMTEK]** Luring Sesi Penyamaan Persepsi Asesor + Penerimaan Plotting
6	**22 - 31 Juli 2024**	Periode I - Pelaksanaan Penilaian dan Pendampingan - **PLENO 31 Juli**
7	**1 - 8 Agustus 2024**	Periode II - Pelaksanaan Penilaian dan Pendampingan - **PLENO 8 Agustus**
8	**9 - 16 Agustus 2024**	Periode III - Pelaksanaan Penilaian dan Pendampingan - **PLENO 16 Agustus**
9	**19 - 26 Agustus 2024**	Periode IV - Pelaksanaan Penilaian dan Pendampingan - **PLENO 26 Agustus**
10	**19 - 30 Agustus 2024**	Penandatanganan dan penerbitan sertifikat rekomendasi oleh Dikti
11	**1 September 2024**	Pembukaan pengajuan usulan Periode II

51% Ajuan Kenaikan Jabatan adalah Ajuan Valid dan layak untuk diproses pada tahapan berikutnya (pengesahan pimpinan PT/LLDIKTI/KL)



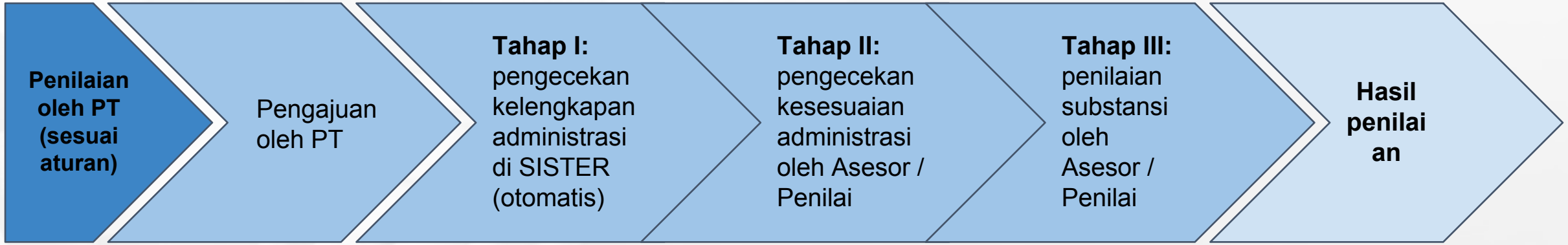
Instansi Pembina	Pengajuan	Dosen Eligible	Pengajuan di Draf	Pengajuan Valid
PTN	LK	15,865	2,012	1,091
	GB	7,471	1,875	1,220
PTKL	LK	14,142	769	484
	GB	2,256	181	109
LLDIKTI	LK	38,825	2,503	866
	GB	3,244	775	363
Total		**81,803**	**8,115**	**4,133**



Garis Besar

Alur Tahap Kenaikan Jabatan Akademik

Penilaian di PT/LLDIKTI / KL dan Pengajuan	Penilaian di Kemendikbud untuk LK dan GB	Selesai



Catatan:

- **PT harus mengikuti proses pengaturan kenaikan jabatan akademik dimana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan, jika tidak mengikuti proses maka ajuan promosi dari PT bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab PT.**
- **Ajuan yang tidak memenuhi kriteria administratif dan penilaian substantif di periode pengajuan pertama maka dapat mengajukan kembali di periode berikutnya.**

Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Perguruan Tinggi

No	Persyaratan	Keterangan
1	**Dokumen proporsi peta jabatan**	PT menentukan proporsi masing-masing jabatan akademik Dosen oleh PT. • PT mempunyai visi, misi, dan tujuan yang disusun sesuai dengan karakteristik/jati diri masing-masing dalam kerangka pengembangan keilmuan (akademik), pengembangan penerapan keilmuan (vokasi), dan pengembangan keprofesian (akademik dan vokasi); • PT menuangkan kebutuhan sumber daya dosen untuk mendukung visi, misi, dan tujuan PT; • PT mempunyai rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang jelas; • PT menuangkan rencana kebutuhan sumber daya, pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan PT dalam dokumen kebutuhan peta jabatan dan formasi jabatan akademik/fungsional dosen; • Untuk formasi peta jabatan ASN, sesuai persetujuan PT dan KemenpanRB (jika sudah ada)
2	**Dokumen pakta integritas PT**	Dokumen PT menyatakan kebenaran dan pertanggungjawaban PT atas ajuan kenaikan jabatan. Dokumen ini menunjukkan bahwa PT sudah melakukan proses penilaian sesuai prosedur penilaian yang dikeluarkan Kemdikbudristek. Pimpinan PT bersedia menerima **sanksi** jika dokumen yang diserahkan **tidak sesuai** dengan aturan yang berlaku.
3	**Dokumen komite integritas akademik Perguruan Tinggi.**	Perguruan Tinggi untuk membentuk komite integritas akademik di bawah Pimpinan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi memastikan bahwa setiap usulan kenaikan jabatan yang akan diajukan dan diproses oleh Perguruan Tinggi telah melalui pertimbangan integritas akademik

Catatan: Pastikan dokumen sesuai format dan isi dokumen sesuai panduan, jika tidak sesuai format dan panduan, maka pengajuan tidak diproses dan hanya bisa diajukan ulang di periode berikutnya.

Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen: Dosen

No	Persyaratan	Keterangan
1	**Pemutakhiran data profil dosen.**	Dosen memastikan bahwa data profil dosen di SISTER dan PDDIKTI sebelum melakukan pengajuan kenaikan jabatan.
2	**Pemenuhan kinerja dosen**	Sebagai syarat dalam kenaikan jabatan akademik, maka dosen harus memenuhi kinerja dosen. Pemenuhan kinerja dosen meliputi: ● Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama setidaknya 4 (empat) semester terakhir pada saat menjabat di jabatan akademik saat ini; ● Menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit. Sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan: ○ Bagi dosen PNS: Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integrasi dan PAK Konversi; ○ Bagi Dosen Non PNS: Dokumen DUPAK yang dinilai oleh PTN/LDIKTI/KL. Pedoman penilaian DUPAK oleh PTN/LLDIKTI/KL; ○ (penjelasan tata cara pengisian pada halaman selanjutnya).
3	**Pemenuhan dokumen pendukung**	Dokumen pendukung ajuan meliputi: ● Surat pengantar dari PT/LLDIKTI/Kementerian terkait; ● Surat Persetujuan/Pertimbangan Senat dan Daftar Hadir Anggota Senat; ● Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah; ● Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah.
4	**Pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke Jenjang Akademik diatasnya**	Karya Ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dan Syarat Khusus Tambahan untuk Kenaikan ke Guru Besar

Tambahan catatan

- **Revisi AK Integrasi**
  - Ketika ada kesalahan jumlah AK Integrasi dan PAK Konversi, Dosen Pengusul dan PT masih bisa melakukan penarikan AK Integrasi selama memenuhi syarat
  - Mengajukan dokumen kinerja sampai tahun 2022 yang belum diusulkan di AK Integrasi sebelumnya
  - Bersurat ke Dikti untuk proses penarikan bagi ajuan LK & GB
  - Baru diproses kembali AK Integrasi
  - Perpanjangan AK Integrasi hanya dibuka di Periode I

- **Contoh**
  - Kenaikan dari LK ke GB
    - Kebutuhan PAK Konversi (AK 2023 + AK Integrasi) = 450
    - Dosen F akan mengajukan ke GB dengan AK yang dimiliki
      - F adalah seorang PNS, IVB
      - AK Integrasi 421
      - AK Konversi 25 *(berdasarkan predikat "Baik" di SKP)*
      - PAK Konversi 421 + 25 = 446
  - Kekurangan AK
    - Ternyata AK kurang 4, dan Dosen memiliki kinerja yang belum di klaim di AK Integrasi.
    - PT dapat mengajukan ke Dikti untuk penarikan AK Integrasi dan menambahkan kum yang kurang.
      - Catatan: kredit yang bisa diklaim untuk AK Integrasi hanya kinerja yang dilakukan sampai dengan Desember 2022.
  - Mengajukan kembali kenaikan dari LK ke GB dengan AK baru
    - AK Integrasi 426 (sudah di revisi), AK Konversi 25
    - PAK Konversi 426 + 25 = 451 >> **cukup untuk memenuhi syarat jumlah kum**

Syarat Khusus Karya Ilmiah

Proses Penilaian oleh PT

Administrasi

- PT memastikan sudah melakukan proses tahapan internal penilaian kenaikan jabatan akademik sebelum mengeluarkan dokumen.
- PT mengecek kesesuaian dokumen dengan format dan panduan.

Syarat Khusus

PT untuk mengecek kompetensi penulisan dan kualitas tulisan antara lain:

- Penulisan karil dilakukan secara benar, misal:
  - mengikuti kaidah penulisan karil;
  - tidak ada penggambaran yg tidak terbaca;
  - sitasi dilakukan dengan lengkap dan benar;
  - bahasa tidak dicampur (kadang masih dijumpai bahasa Indonesia).
- Relevansi kompetensi Dosen dengan substansi karya ilmiah.
- Kesesuaian antara lingkup/subjek area jurnal dengan karya ilmiah yang diusulkan *(Karya ilmiah dipublish di scope area jurnal yang sesuai dengan bidang ilmu)*.
- Kebaharuan dalam karya ilmiah / inovasi dalam karya ilmiah.
- Kepastian tidak ada pelanggaran integritas akademik:
  - Plagiat;
  - Fabrikasi;
  - Falsifikasi;
  - Pengajuan jamak;
  - Kepengarangan tidak sah;
  - Konflik kepentingan.
- Mengevaluasi proses penerbitan yang berintegritas. Misalnya: melalui proses reviu dari penerbit secara bermutu dan fundamental (dari penulis yang ditunjukkan melalui dokumen korespondensi).
- Integritas sosial:
  - Kolaborasi penelitian;
  - Kemitraaan nasional/internasional.

Profil Calon LK/GB

Kompetensi Perilaku & Penilaian integritas calon:

- Dilihat dari profil;
- Dicek rekam jejak akademik dan perilaku (dari jabatan akademik terakhir untuk melihat kepatutan/kepantasan dalam menduduki jabatan Guru Besar):
  - Melalui kinerja Dosen selama di Perguruan Tinggi Bapak / Ibu;
  - Memastikan kinerja selama di PT tidak melanggar integritas akademik.

Identifikasi Masalah Syarat khusus Karya Ilmiah

Dalam Pengusulan Penilaian Jabatan Akademik, seringkali ditemukan hasil review dari peer review yang tidak optimal karena:

1. Jurnal masuk kriteria Discontinue
2. Laman Jurnal tidak dapat diakses
3. Laman yang disajikan bulan langsung dari jurnal melainkan dari laman pengindeks
4. Dewan Editor/Editorial Board tidak tampak di halaman laman jurnal
5. Jumlah terbitan per jurnal tidak konsisten
6. Peer review tidak memberikan review yang memadai
7. Pengelola jurnal juga tidak melakukan aspek tipografi yang memadai

Kasus SINTA dan penyelesaian

- **Kasus 1 - Authorship**
  - Pastikan Publikasi yang diklaim di Scopus dan Google Scholar itu benar sehingga yang masuk ke Sinta adalah Publikasi yang valid karyanya, karena nama sama bisa jadi beda orang, afiliasi dan keilmuah
  - Semua data autorship harus dimasukkan dengan baik dan benar. Contoh: jika ada 2 nama, maka diisikan 2 nama; jika penulis 1 nama, maka diisikan 1 nama
- **Kasus 2 - Syarat khusus dari SINTA**
  - Input syarat khusus wajib publikasi yang sudah ada di ID SINTA dengan mekanisme sinkronisasi (bukan manual)
- **Kasus 3 – Publikasi di Jurnal**
  - Contoh artikel baik
  - Contoh artikel di Jurnal bermasalah/Discontinue

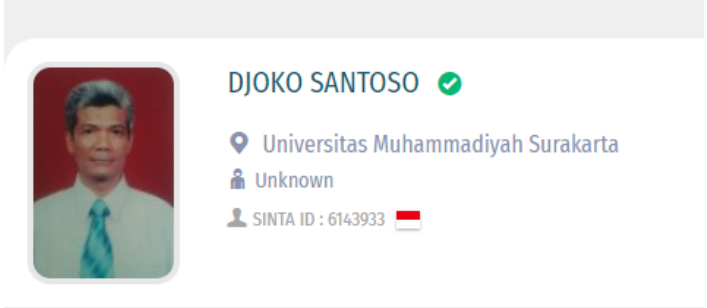
Nama Sama di Sinta Case: Djoko Santoso













Nama Djoko Santoso
bukan satu2nya,
ada beberapa nama mohon
Dapat dicek sebelum diclaim

Profil Publikasi Ilmiah di Sinta



DJOKO SANTOSO

Institut Teknologi Bandung
S1 - Teknik Geofisika
SINTA ID : 6001017

Geology and Geophysics

2.427	483	0	0
SINTA Score Overall	SINTA Score 3Yr	Affil Score	Affil Score 3Yr

Articles | Researches | Community Services | IPRs | Books | Metrics

Latest number of publications



Scopus | Web of Science | Garuda | Google Scholar | RAMA

Scopus Analysis

Valuation of an unexplored oilfield under uncertain oil price and reservoir condition: A stochastic dynamic programming approach with simulation-based reward function

no Q as Journal | Geoenergy Science and Engineering

A data-driven approach to estimating post-discovery parameters of unexplored oilfields

Q1 as Journal | Petroleum

Author Order : 4 of 4 | Creator : Pratikto F.

2023 | 1 cited

Designing antimicrobial active packaging films based on chitosan plus fungus comb ethyl acetate extract from Indo-Malayan termite mounds

Q2 as Journal | Biodiversitas

Author Order : 12 of 16 | Creator : Witasari L.D.

2023 | 0 cited

????

Selectively mixed matrix hemodialysis membrane for adequate clearance of p-cresol by the incorporation of imprinted zeolite

Q1 as Journal | RSC Advances

Author Order : 6 of 10 | Creator : Raharjo Y.

2023 | 3 cited

Soursop leaves (Annona muricata Linn) ethanol extract prevents cisplatin-induced kidney injury of mice (Mus musculus) through SOD and MDA analysis

Q4 as Journal | Bali Medical Journal

Author Order : 2 of 4 | Creator : Sudanta I.M.

2023 | 0 cited

Contoh Publikasi Nama sama Beda Afiliasi dan Subject di Scopus

A data-driven approach to estimating post-discovery parameters of unexplored oilfields

Pratikto, Fransiscus[a] ; Indratno, Sapto[b, c]; Suryadi, Kadarsah[a]; Santoso, Djoko[d]
Save all to author list

[a] Industrial Engineering Department, Bandung Institute of Technology, Jl Ganesha 10, Bandung, 40132, Indonesia

[b] Mathematics Department, Bandung Institute of Technology, Jl Ganesha 10, Bandung, 40132, Indonesia

[c] Geophysical Engineering Department, Bandung Institute of Technology, Jl Ganesha 10, Bandung, 40132, Indonesia

[d] University Center of Excellence on Artificial Intelligence for Vision, Institut Teknologi Bandung, Natural Language Processing & Big Data Analytics (U-CoE AI-VLB), West Java, Bandung, 40132, Indonesia

Biodiversitas • Open Access • Volume 24, Issue 11, Pages 5947 - 5955 • 2023

Designing antimicrobial active packaging films based on chitosan plus fungus comb ethyl acetate extract from Indo-Malayan termite mounds

Witasari, Lucia Dhiantika[a] ; Lizar, Deborah Patricia[a]; Florencia, Olivia Martha[a]; Ramadhan, Arif[a]; Fiana, Nur Afni Oktri[a]; Supriyadi, Supriyadi[a]; Pratiwi, Sylvia Utami Tunjung[b]; Nandika, Dodi[c]; Karlinasari, Lina[c]; Arinana, Arinana[c]; Batubara, Irmanida[d]; Santoso, Djoko[e]
Show additional authors Save all to author list

[a] Department of Food and Agricultural Products Technology, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora No. 1, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia

[b] Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sekip Utara, Senolowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia

[c] Department of Forest Products, Faculty of Forestry and Environment, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Dramaga, West Java, Bogor, 16680, Indonesia

[d] Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Tropical Biopharmaca Research Center, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Dramaga, West Java, Bogor, 16680, Indonesia

[e] Faculty of Medicine, Campus A Universitas Airlangga, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47, Pacar Kembang, Tambaksari, East Java, Surabaya, 60132, Indonesia

[f] Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, West Java, Bandung, 40132, Indonesia

Pastikan Profil di Scopus dan Google Scholar sudah betul Karyanya

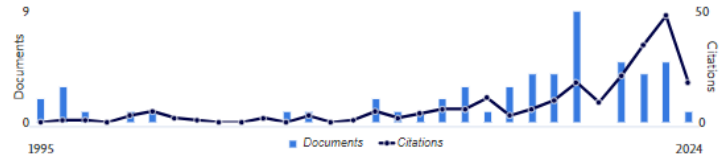
Santoso, Djoko

Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia · 58671335700 · Connect to ORCID · View more

224	57	9	View all metrics >
Citations by *204 documents*	Documents	*h*-index View *h*-graph	

Set alert · Save to list · Edit profile · ••• More

Document & citation trends



Most contributed Topics 2018–2022

Carbon Dioxide; Oil Field; Calcite
2 documents

Microgravity; Gravity Anomaly; Geophysics
2 documents

Synthetic Aperture Radar; Interferometry; Subsidence
1 document

Analyze author output · Citation overview · View all Topics

57 Documents · Author Metrics (New) · Cited by 204 documents · 3 Preprints · 115 Co-Authors · 19 Topics · 0 Awarded Grants (Beta)

57 documents

Export all · Save all to list · Sort by Date (newest)

Article • *Open access*
Delineating geological structure utilizing integration of remote sensing and gravity data: a study from Halmahera, North Molucca, Indonesia
Aprina, P.U., Santoso, D., Alawiyah, S., Prasetyo, N., Ibrahim, K.
Vietnam Journal of Earth Sciences, 2024, 46(2), pp. 147–168
2 Citations
Show abstract · View at Publisher · Related documents

Article • *Open access*
Lesson learned from the assessment of planned converted CO_2 injection well integrity in Indonesia – CCUS project
Marbun, B.T.H., Sinaga, S.Z., Purbantanu, B., ...Saprudin, W., Andhika, B.
Heliyon, 2023, 9(8), e18505
2 Citations

> View list in search results format
> View references
Set document alert

Author Position
Based on 34 selected documents for 2013 - 2022

First author • 12%

4	6	1.319
Documents	Average citations	FWCI

Last author • 32%



Djoko Santoso

FOLLOW

Professor of of Geology and Geophysics, Institut Teknologi Bandung
Verified email at gf.itb.ac.id - Homepage
Geology and Geophysics

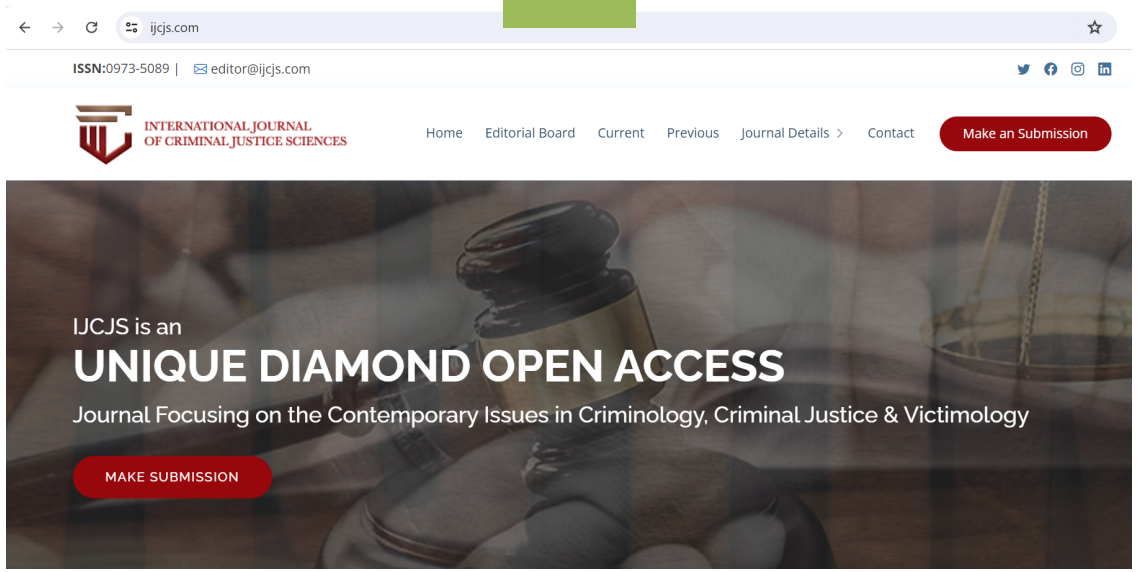
TITLE	CITED BY	YEAR
Pengantar teknik geofisika D Santoso ITB, bandung	299	2002
Buku ajar ilmu penyakit dalam T Askandar, PB Setiawan, D Santoso, G Soegiharto Edisi Ke-1. Surabaya: FK UNAIR, 125	44	2015
Fractal geometry of the Sumatra active fault system and its geodynamical implications S Sukmono, MT Zen, WGA Kadir, L Hendrajaya, D Santoso, J Dubois Journal of Geodynamics 22 (1-2), 1-9	34	1996
Catatan Kuliah "Eksplorasi Energi Geothermal" D Santoso Bandung: Penerbit ITB	33	2004
Thromboembolic involvement and its possible pathogenesis in COVID-19 mortality: lesson from post-mortem reports KD Herrugrahanto, DN Utomo, H Hariman, NC Budhiparama	32	2021

1. Masuk Akun Scopus dan exclude yang bukan karyanya
2. Masuk Akun Google Scholar delete yang bukan karyanya
3. Sinkronisasi di Sinta dan SIster

Misconduct Publikasi Ilmiah

Hot Issue: kasus Guru Besar (Tempo)

Asli



International Journal of Criminal Justice Sciences

Years currently covered by Scopus: from 2017 to 2024

Publisher: South Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV)

ISSN: 0973-5089

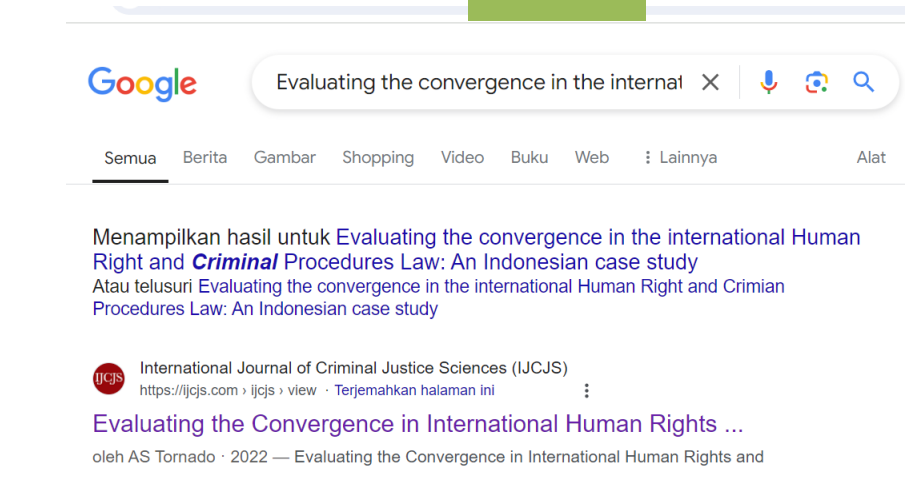
Subject area: Social Sciences: Law

Source type: Journal

View all documents > | Set document alert | Save to source list



Palsu





Kasus Pengutipan dan Pengelolaan Referensi Bermasalah

dengan wanita yang tidak termasuk kelompok berisiko. Di United Kingdom tahun 2011 diketahui bahwa 95% orang yang terdiagnosa HIV positif diakibatkan oleh perilaku seksual berisiko (www.nhs.uk)

Jumlah kumulatif infeksi baru HIV yang dilaporkan di Indonesia meningkat secara tajam dari 7,195 di tahun 2006 menjadi 76,879 di tahun 2011 (*Indonesian National AIDS Commission:* 2012) . Sedangkan di Tahun 2014 (Januari-Maret) tercatat kasus infeksi HIV baru yang dilaporkan sebesar 6626 kasus dan kasus AIDS yang dilaporkan sebesar 308 kasus. Jadi Jumlah kumulatif kasus HIV sampai dengan tahun 2014 sebesar 134.042 kasus, dan kumulatif kasus AIDS hingga Maret 2014 sebesar 54.231 kasus, sementara kasus yang meninggal sebesar 9615 orang (Ditjen PP&PL Kemenkes RI).

Kemudian tahun 2012 dilakukan estimasi dan modeling HIV AIDS oleh Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk menentukan estimasi populasi rawan tertular HIV di Indonesia dan perkiraan jumlah ODHA. Secara keseluruhan berdasarkan estimasi tersebut dari 33 provinsi di Indonesia jumlah wanita penjaja seks tidak langsung berjumlah 104,048 orang . Dari estimasi per provinsi, jumlah penjajak sex tidak langsung (WPSTL) terbesar di Provinsi DKI Jakarta, yaitu berjumlah 23,386 orang, dan provinsi

1. Gaya Kutipan Tidak Konsisten (APA, Harvard, Chicago, IEEE,, dll)
2. Minimnya Referensi Primer; 3. Pustaka Acuan Lama

DAFTAR PUSTAKA

1 DepKes RI, 1995, Pedoman pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut,

2 JKG Poltekkes Kemenkes Semarang, 2013. Laporan Pelayanan Asuhan SD Pedalangan 03 Semarang

3 Maulani, C. *Kiat Merawat Gigi Anak*. Gramedia. Jakarta; 2005

4 Riyanti, E. *Pengenalan dan Perawatan Gigi Anak Sejak Dini.* ed. Seminar Sehari Kesehatan-Psikologi Anak; 2005

5 Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku.* Rineka Cipta. Jakarta; 2010.

6 DepKes RI, 1995, Pedoman pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut,

7 Notoatmodjo, S. *Ilmu Perilaku Kesehatan.* Rineka Cipta. Jakarta; 2003

8 Machfoedz, I. Zein, AY. *Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Anak-Anak dan Ibu Hamil.* Fitramaya. Yogyakarta; 2005

9 Solita, Sarwono. *Sisiologi Kesehatan Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya.* Gajah Mada Universitiy Press. Yogyakarta; 2007

10 Notoatmojo, S. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku.* Andi Offset. Yogyakarta; 2003

11 Mozarta, M. *Perilaku Ibu Tentukan Kesehatan Gigi Anak. 2010* http://www.Blongspot.opera/kesgi.htm Diakses tanggal 24 Juli 2013

12 Wawan, A. Dewi, M. *Teori & Pengukuran Pengetahuan. Sikat dan Perilaku Manusia.* Nuha Medika. Yogyakarta; 2010

13 Notoatmodjo, S,. *Ilmu Kesehatan Masyarakat.* Rineka Cipta. Jakarta; 1997

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, et al. (2008). *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol 3/No.2/Agustus 2008*: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Wanita Pekerja Seks Jalanan Dalam Upaya Pencegahan IMS/HIV&AIDS Di Sekitar Alun-Alun Dan Candi Prambanan Kabupaten Klaten: Semarang. Undip

Direktorat Jendral PP & PL. (2014). *Statistik kasus HIV/AIDS di Indonesia.* Jakarta: Kementrian Kesehatan

_____.(2013). *Pedoman Nasional Tes dan Konseling HIV& AIDS :* Jakarta. Kementerian Kesehatan RI

El-Sadr, Wafaa,dkk.(1994). *Evaluation and management of early HIV infection.* Rockville: United States Department of Health and Human Services

Fachlaeli, Evi.(2012). *Hubungan konsistensi penggunaan kondom satu bulan terakhir dengan kejadian infeksi menular seksual (IMS) pada wanita penjaja seks langsung (WPSL) di kabupaten Bekasi & Kota Bandung Jawa*

Unsur yang harus ada dalam Penulisan Referensi

1. Siapa Yang menulis
2. Apa Yang ditulis
3. Kapan Ditulis
4. Dimana ditulis

Artikel Yang baik: Diperoleh dari Referensi Primer, Mutakhir dan Penulisan yang baik

world biomes (Costanza et al., 1997). But because this zone is subject to several aspects of global change (climate change, biodiversity loss, pollutions…), which continue to take place at a breath-taking pace (Rockström et al., 2009), they are zones where risks to human and ecosystem health (Jackson et al., 2001) and loss of ecosystem services (Barbier et al., 2011) are particularly high.

Hence, to move towards "sustainability" of the coastal zone, for 20 years, a paradigm shift was made in its management, going from science-based management that involved primarily the consideration of scientific knowledge, warnings and advice, to the integration of local and autochthonous knowledge and the most successful forms of "participation". Indeed, as noted by Bremer and Glavovic (2013), the actors of the so-called Integrated Coastal Management (ICM) have long sought to create political settings within which coastal communities can arrive at collective decisions and support these decisions with the best quality knowledge available. Traditionally, this has been through the integration of natural sciences and social sciences with the political processes of decision- and policymaking and management, across the science/policy interface (Mazé and Ragueneau, 2017). These authors argued that in the future, this interface should be framed as a "governance setting". It is this governance setting in the coastal zone that we explore in this paper.

There have been many studies carried out on these tools of governance of the sea at global, regional, and local scales (Rey-Valette and Antona, 2009). They have focused in particular on the effects of institutions (such as those like the creation of Marine Protected Areas (MPAs) and national parks) on communities and on the role of local communities in decision-making processes (Crespi et al., 2014; Ostrom and Dolsak, 2003), sometimes in a support perspective (Chlous-Ducharme and Gourmelon, 2011). But "despite many years of intervention of scientists, governments, local communities and other actors, the health of coastal ecosystems continues to decline" (Benham and Daniell, 2016). This inadequacy or inefficiency of public action towards environment preservation is attested by social sciences and environmental management studies (Jordan and Russell, 2014; Laurans et al., 2013; Rochette, 2013). This gap between intentions and achievements has so far been mostly explained by the complexity of the social world and political and institutional system ("Implementation Gap") but also by the complexity of science and of the science/policy interface themselves ("Knowledge Gap").

This paper examines to what extent these difficulties result from knowledge/power issues at the core of interactions among multiscale networks and actors. It investigates how a research at the frontier of anthropology and politics could nurture this analysis. By exploring the problems confronted by Integrated coastal zones management (ICZM) in its implementation, it sheds light on the governance issue. The relevance of the notion of governance in terms of tackling inequity issues linked to sustainable development will be assessed and the added value of the analysis of government of coastal zone considered.

2. From Integrated costal management (ICZM) towards an adaptive co-management?

The concept of integrated coastal zone management (ICZM) has been proposed to link more closely the conservation of littoral ecosystems with the sustainable development of coastal activities. In this perspective ICZM rests on an integration of natural resources preservation and human development goals, an integration of the coastal ecosystems and their related economic activities, and an integration of value chains and networks of actors. The core principle is to unify the different visions of the territory to define coherent policies which limit competitions between different segments of local authorities or vested interests. In addition, it combines scales of regulation from the local problems to the global changes. With such an ambition ICZM projects face difficulties to achieve all these goals, notably given the specific characteristics of each coastal zone which demand high adaptability to social and ecological contexts.

Generally, ICZM programs spur the formulation of indicators dedicated to mingling very diverse social and natural criteria. The set of indicators is mainly oriented towards an assessment process to redefine segmented public policies through shared goals. However little is known about who is involved in the definition of indicators and for what purpose/interests. ICZM often generates a new agency to coordinate state agencies and local authorities, but it generally lacks institutional and legal power to mediate disputes among preexisting institutions and actors (Dahou et al., 2011). Besides, as it is rarely complemented by shifts in terms of decentralization progress (Mazé and Meur-Férec, 2017), it tends to reinforce state authorities (Wiber and Recchia, 2010). ICZM process establishes parallel institutions, whose action should be negotiated in the hierarchy of state authorities and government priorities. This situation limits the capacity for change and innovation, for example in earth-sea interface management, as maritime government could be under the responsibility of specific central state bodies or military organizations.

It has also been demonstrated that ICZM is well anchored in four deep-rooted illusions (Billé, 2008): the illusion that round table discussions can solve any problem, the coastal manager myth, the community illusion and the positivist illusion. The concept of ICZM is highly indebted to the notion of governance that idealizes cooperation among institutions and actors. Instead of facilitating compromises, this kind of arena of coordination masks the power of expert knowledge that may strengthen the defense of stakeholder's interests. This depolitization of management impedes to tackle broader issues of social and environmental accountability. ICZM aims to disseminate environmental and social data to improve cooperation between actors in decision-making albeit without considering the hindrances to this circulation due to power relationships. The ICZM process designed to attain common goals or at least to find ways to overcome conflicts tends to mask the exclusion of actors from cooperation arenas.

More recently, the notion of adaptive co-management (Armitage et al., 2007; Plummer et al., 2012) has been developed to designate one ideal mode of social-ecological

Acknowledgements

The authors wish to thank the French CNRS for constant support in the development of ApoliMer, coordinated by CM, and its transformation into a RTPi, "Réseau thématique pluridisciplinaire international", CNRS, France. The authors also thank the French LTER Network, so-called "Réseau des zones ateliers" (CNRS–INEE), for the funding of a series of workshops (2016–2018), coordinated by CM and OR and dedicated to the governance of social-ecological systems. This is a contribution to the SPA project, funded by the "Mission for Interdisciplinarity" of the French CNRS (2017–2018). They finally thank IRD for its supports for MPA's and ICZM researches in North and West Africa (TD).

References

Anderies, J.M., et al., 2013. Aligning key concepts for global change policy: robustness, resilience, and sustainability. Ecol. Soc. 18 (2), 8.
Armitage, D., Berkes, F., Doubleday, N. (Eds.), 2007. Adaptive co-management: collaboration, learning, and multi-level governance. University of British Columbia Press, Vancouver.
Barbier, E.B., et al., 2011. The value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecol. Monogr. 81/2, 169–193.
Benham, C.F., Daniell, K.A., 2016. Putting transdisciplinarity research into practice: a participatory approach to understanding change in coastal social-ecological systems. Ocean Coast. Manage. 128, 29–39.
Berkes, F., 2008. Sacred ecology: traditional ecological knowledge and resource management, 2nd Ed. Taylor and Francis, Philadelphia.
Berman, B.J., Lonsdale, J.M., 1992. Unhappy valley. Conflict in Kenya and Africa. James Currey (Eastern African Studies), London.
Billé, R., 2008. Integrated coastal zone management: four entrenched illusions, S.A.P.I.ENS [Online], 1.2. .
Blanchard, A., Vanderlinden, J.-P., 2012. Prerequisites to interdisciplinary research for climate change: lessons from a participatory action research process in Île-de-France. Int. J. Sustainable Dev. 16 (1/2) .
Boonstra, W.J., 2016. Conceptualizing power to study social-ecological interactions. Ecol. Soc. 21 (1), 21.
Bremer, S., Glavovic, B., 2013. Mobilizing knowledge for coastal governance: re-framing the science-policy interface for integrated coastal management. Coast. Manage. 41 (1), 39–56.
Carter, C., 2015. Who governs Europe? Public versus private regulation of the sustainability of fish feeds. J. Eur. Integration 37 (3), 335–352.
Chauvaud, L., Jean, F., Ragueneau, O., Thouzeau, G., 2000. Long-term variation of the Bay of Brest ecosystem: benthic-pelagic coupling revisited. Mar. Ecol. Prog. Ser. 200, 35–48.
Chlous-Ducharme, F., Gourmelon, F., 2011. Modélisation d'accompagnement : appropriation de la démarche par différents partenaires et conséquences. VertigO Rev. Electron. Sci. Environ. 11 (3) .
Cloern, J.E., 1982. Does the benthos control phytoplankton bio-mass in South San Francisco Bay (USA)? Mar. Ecol. Prog. Ser. 9, 191–202.
Cloern, J.E., et al., 2015. Human activities and climate variability drive fast-paced change across the world's estuarine-coastal ecosystems. Global Change Biol. 22 (2), 513–529.
Collins, S.L., et al., 2010. An integrated conceptual framework for long-term social–ecological research. Front. Ecol. Environ. 9, 351–357.
Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., et al., 1997. The value of the world's capital services and natural capital. Nature 387, 253–260.
Crespi, B., Laval, P., Sabinot, C., 2014. La communauté de pêcheurs de Taperebá (Amapá-Brésil) face à la création du Parc national du Cabo Orange. Espace Popul. Soc. 2–3.
Dahou, T., 2009. La politique des espaces maritimes en Afrique. Louvoyer entre local et global. Polit. Afr. 116 (4), 5–22.
Dahou, T., 2010. Gérer les ressources sans gouverner les hommes, le dilemme des aires marines protégées. Anthropol. Soc. 34 (1), 75–93.
Dahou, T., 2011. Trends come and go, the community remains. Cah. Etudes Afr. 202–203 (2–3), 395–414.
Dahou, T., 2017. Rights of access or rights to bypass? Marine concessions in Algeria. In: Ben Hounet, Y. (Ed.), Law and property in Algeria. Brill, London.
Dahou, T., Ould Cheikh, A.W., 2007. L'autochtonie dans les Aires marines protégées. Terrain de conflit en Mauritanie et au Sénégal. Polit. Afr. 108 (4), 173–190.
Dahou, T., et al., 2004. La gouvernance des aires marines protégées : leçons ouest-africaines. VertigO Rev. Electron. Sci. Environ 5 (3), 2004 (En ligne).
Dahou, T., Gassab, M., Sallemi, R., 2011. Zones sensibles et luttes d'intérêts en Tunisie. Vers une gestion intégrée des territoires et des ressources dans la baie de Monastir ? In: Dahou, T., et al. (Eds.), Pouvoirs, sociétés et nature au sud de la Méditerranée. Karthala, Paris, pp. 159–181.
Dahou, T., Elloumi, M., Molle, F., 2013. Appropriations et conflits sur les régimes d'accès aux ressources renouvelables. Etudes Rurales 192, 9–23.
De Certeau, M., 1990. L'invention du quotidien. Gallimard (349 p.).
DeSombre, E.R., 2006. Response to the global warming tragedy. Ethics Int. Aff. 18 (1), 41–46.
Dietz, T., Ostrom, E., Stern, P.C., 2003. The struggle to govern the commons. Science 302, 1907–1912.
Dugdale, R., Wilkerson, F., Hogue, V.E., Marchi, A., 2007. The role of ammonium and nitrate in spring bloom development in San Francisco bay. Estuar. Coast. Shelf Sci. 73, 17–29.
Epstein, G., et al., 2014. Studying power with the social-ecological system framework. Underst. Soc. Nat. Resources 111–135.
Fabinyi, M., Evans, L., Foale, S., 2014. Social-ecological systems, social diversity, and power: insights from anthropology and political ecology. Ecol. Soc. 19 (4) .
Fabinyi, M., Foale, S., Macintyre, M., 2015. Managing inequality or managing stocks? An ethnographic perspective on the governance of small-scale fisheries. Fish Fish. 16 (3), 471–485.
Foucault, M., 1969. L'Archéologie du savoir. Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences humaines, Paris (288 p.).
Geistdoerfer, A., Mariat-Roy, E., 2011. L'exploitation des ressources marines au sein d'une économie mondialisée : spécificités et enjeux. In: Actes du colloque de la Chaire Michael Singleton, Terres (dés)humanisées : ressources et climat/(Des)humanized lands: resources and climate. Université Catholique de Louvain/LAAP, 369–388.
Geistdoerfer, A., 2007. L'anthropologie maritime : un domaine en évolution : hors cadre de l'anthropologie sociale. Zainak 29, 23–38.
Geistdoerfer, A., 1983. Fonctions spécifiques des techniques de pêche dans une production halieutique. Actes de la table ronde « Technologie Culturelle » Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris87–98.
Hart, D.D., Bell, K.P., Lindenfeld, L.A., Jain, S., Johnson, T.R., Ranco, D., McGill, B., 2015. Strengthening the role of universities in addressing sustainability challenges: the Mitchell Center for Sustainability Solutions as an institutional experiment. Ecol. Soc. 20 (2), 4 (https://doi.org/10.5751/ES-07283-200204).
Hess, C., Ostrom, E. (Eds.), 2007. Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Holling, C.S., 2001. Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. Ecosystems 4, 390–405.
Itçaina, X., Weisbein, J., 2011. Marées noires et politique. Gestion et contestations de la pollution du Prestige en France et en Espagne. L'Harmattan, Paris.
Jackson, Jeremy, B.C., et al., 2001. Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science 293, 629–637.
Jordan, A., Lenschow, A., 2010. Environmental policy integration: a state of the art review. Environ. Policy Govern. 20/3, 147–158.
Jordan, A., Russell, D., 2014. Embedding the concept of ecosystem services? The utilization of ecological knowledge in different policy venues. Environ. Plann. C Govern. Policy 32/2, 192–207.
Jul-Larsen, E., et, al. (Eds.), 2011. Une anthropologie entre pouvoirs et historie. Conversations autour de l'œuvre de Jean-Pierre Chauveau. Karthala/IRD, Paris, Marseille (657 p.).
Kates, R.W., et al., 2001. Environment and development, sustainability science. Science 292/5517, 641–642.
Kofinas, G.P., 2009. Adaptive co-management in social-ecological governance. In: Chapin, F.S., Kofinas, G.P., Folke, C. (Eds.), Principles of ecosystem stewardship, Resilience-based natural resource management in a changing world. Springer, (Chapter 4), pp. 77–101.
Kofinas, G.P., et al., 2013. Adaptive and transformative capacity. In: Arctic resilience interim report to the Arctic council. 71–91.
Kusumawati, R., Visser, L., 2014. Collaboration or contention? Decentralised marine governance. Berau Anthropol. Forum 24, 21–46.
Kusumawati, R., Visser, L., 2016. Capturing the elite in marine conservation in Northeast Kalimantan. Hum. Ecol. 44, 301–310.
Laborier, P., Trom, D. (Eds.), 2003. Historicités de l'action publique. PUF, Paris.
Lafaye, C., 1994. Aménager un site littoral. Entre politique et pragmatisme. Etudes Rurales 133 (1), 163–180.

Kasus 1 Plagiat di Naskah Jurnal

ISSUE	TITLE	
Vol 4, No 2 (2014): [redacted] JURNAL, VOL.4, NO.2, SEPTEMBER 2014 [redacted]	PENGARUH [redacted] PADA TANA[redacted] TERHADAP KUAT GESER TANAH	ABSTRACT PDF
Vol 5, No 2 (2015) [redacted] JURNAL, Vol.5, No.2, September 2015 [redacted]	PENGARUH [redacted] PADA TANA[redacted] TERHADAP KUAT GESER TANAH	ABSTRACT PDF

0 - 0 of 2 Items

PENGARUH PENAMBAHAN PASIR PADA TANAH LEMPUNG TERHADAP KUAT GESER TANAH

[redacted]

Abstrak

Tanah berguna sebagai bahan bangunan pada berbagai macam pekerjaan teknik sipil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pasir yang dicampurkan pada tanah lempung dengan variasi 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap parameter kuat geser tanah. Tanah yang diuji pada penelitian ini berasal dari Desa Alue Awe Bukit Rata kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pengujian kuat geser dilakukan dengan triaxial dan jumlah benda ujinya sebanyak 12 sampel. Berdasarkan klasifikasi *AASHTO* tanah tergolong A-7-6 dan berdasarkan klasifikasi *USCS* termasuk tanahLempung-Lanau. Tanah ini mempunyai spesifik gravity 2,59, Batas cair 40,51%, Batas Plastis 28,59% dan index plastisitas 12%. Tanah tersebut mempunyai density sebesar 1,58 gr/cm^3 dengan kadar air optimum 17,80%, sehingga pada penambahan pasir 10% dengan density sebesar 1,58 gr/cm^3 dengan w_{opt}17,80% dapat meningkatkan kadar air optimum dan kepadatan keringnya. Parameter kuat geser tanah asli dengan sudut 40°, c sebesar 6,4018 kg/cm^2, 10% sand sudut sebesar 22°, c sebesar 6,7923 kg/cm^2.Semakin ada penambahan pasir semakin meningkat kohesi tanah tersebut, dan sudut geserakan semakin menurun.

Kata Kunci: *Tanah lempung, tanah pasir, kuat geser.*

1. Pendahuluan

Nilai kuat geser tanah merupakan salah satu parameter penting yang di butuhkan dalam perencanaan sebuah struktur, hal ini di sebabkan karena parameter kuat geser tanah dapat memberikan informasi tentang kekuatan suatu masa tanah untuk melawan tegangan geser yang terjadi akibat adanya beban yang di letakan di atasnya misalnya seperti pada perkerasan jalan raya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh parameter nilai kuat geser tanah lempung terhadap variasi campuran pasir berdasarkan pengujian triaksial UU. Manfaat penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya menangani atau mengatasi permasalahan tanah seperti pada timbunan jalan.

2. Tinjauan Kepustakaan

2.1 Umum

Kuat geser adalah kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terjadi pada saat terbebani, keruntuhan geser (Shear failure) tanah terjadi bukan disebabkan karena hancurnya butir-butir tanah tersebut tetapi karena adanya gerak relative. Kekuatan geser tanah yang dimiliki oleh suatu tanah disebabkan oleh:

PENGARUH PENAMBAHAN PASIR PADA TANAH LEMPUNG TERHADAP KUAT GESER TANAH

[redacted]

Abstrak

Tanah berguna sebagai bahan bangunan pada berbagai macam pekerjaan teknik sipil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pasir yang dicampurkan pada tanah lempung dengan variasi 0%, 10%, 20%, dan 30% terhadap parameter kuat geser tanah. Tanah yang diuji pada penelitian ini berasal dari Desa Alue Awe Bukit Rata kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pengujian kuat geser dilakukan dengan triaxial dan jumlah benda ujinya sebanyak 12 sampel. Berdasarkan klasifikasi *AASHTO* tanah tergolong A-7-6 dan berdasarkan klasifikasi *USCS* termasuk tanah Lempung-Lanau. Tanah ini mempunyai spesifik gravity 2,59, Batas cair 40,51%, Batas Plastis 28,59% dan index plastisitas 12%. Tanah tersebut mempunyai density sebesar 1,58 gr/cm^3 dengan kadar air optimum 17,80%, sehingga pada penambahan pasir 10% dengan density sebesar 1,58 gr/cm^3 dengan wopt 17,80% dapat meningkatkan kadar air optimum dan kepadatan keringnya. Parameter kuat geser tanah asli □ = 40°, c = 6,4018 kg/cm^2, 10% sand □ = 22°, c = 6,7923 kg/cm^2. Semakin ada penambahan pasir semakin meningkat kohesi tanah tersebut, dan sudut geser akan semakin menurun.

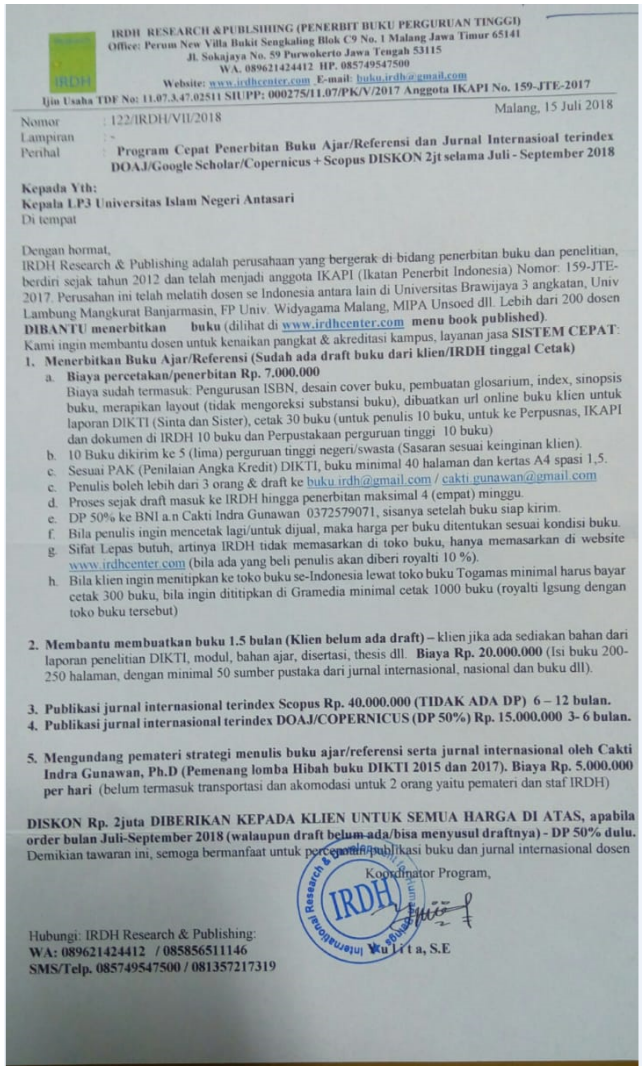
Kata Kunci: *Tanah lempung, tanah pasir, density, kuat geser.*

1. Pendahuluan

Tanah lempung pada umumnya mempunyai plastisitas yang tinggi, permeabilitas sangat rendah dan mempunyai daya dukung yang rendah, sehingga diperlukan stabilisasi tanah lempung dengan penambahan tanah pasir agar tanah benar –benar padat, kuat dan stabil terhadap beban struktur /non struktur. Teknik pemadatan merupakan cara perbaikan tanah relative mudah dan sederhana. Dengan pemadatan kuat geser tanah akan meningkat (*improvement*) sehingga meningkatkan daya dukung tanah. Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel dengan tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat teknis massa tanah. Energi mekanis yang digunakan pemadatan tanah adalah mempertinggi kuat geser tanah, mengurangi sifat mudah mampat (*kompresibilitas*), mengurangi permeabilitas, mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air dan lain-lainnya. Nilai kuat geser tanah merupakan salah satu parameter penting yang dibutuhkan dalam perencanaan sebuah struktur, hal ini disebabkan karena parameter kuat geser tanah dapat memberikan informasi tentang kekuatan suatu masa tanah untuk melawan tegangan geser yang terjadi akibat adanya beban yang di letakan di atasnya misalnya seperti pada perkerasan jalan raya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh parameter nilai kuat geser tanah lempung terhadap variasi campuran pasir berdasarkan pengujian triaksial UU. Manfaat penelitian ini adalah dapat

Kasus Joki Publikasi Ilmiah Terstruktur



IRDH RESEARCH & PUBLSIHING (PENERBIT BUKU PERGURUAN TINGGI)
Office: Perum New Villa Bukit Sengkaling Blok C9 No. 1 Malang Jawa Timur 65141
Jl. Sokajaya No. 59 Purwokerto Jawa Tengah 53115
WA. 089621424412 HP. 085749547500
Website: www.irdhcenter.com E-mail: buku.irdh@gmail.com
Ijin Usaha TDF No: 11.07.3.47.02511 SIUPP: 000275/11.07/PK/V/2017 Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Malang, 15 Juli 2018

Nomor : 122/IRDH/VII/2018
Lampiran : -
Perihal : **Program Cepat Penerbitan Buku Ajar/Referensi dan Jurnal Internasioal terindex DOAJ/Google Scholar/Copernicus + Scopus DISKON 2jt selama Juli - September 2018**

Kepada Yth:
Kepala LP3 Universitas Islam Negeri Antasari
Di tempat

Dengan hormat,
IRDH Research & Publishing adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan penelitian, berdiri sejak tahun 2012 dan telah menjadi anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Nomor: 159-JTE-2017. Perusahan ini telah melatih dosen se Indonesia antara lain di Universitas Brawijaya 3 angkatan, Univ Lambung Mangkurat Banjarmasin, FP Univ. Widyagama Malang, MIPA Unsoed dll. Lebih dari 200 dosen **DIBANTU menerbitkan buku** (dilihat di www.irdhcenter.com **menu book published**).
Kami ingin membantu dosen untuk kenaikan pangkat & akreditasi kampus, layanan jasa **SISTEM CEPAT**:

1. **Menerbitkan Buku Ajar/Referensi (Sudah ada draft buku dari klien/IRDH tinggal Cetak)**
   a. **Biaya percetakan/penerbitan Rp. 7.000.000**
      Biaya sudah termasuk: Pengurusan ISBN, desain cover buku, pembuatan glosarium, index, sinopsis buku, merapikan layout (tidak mengoreksi substansi buku), dibuatkan url online buku klien untuk laporan DIKTI (Sinta dan Sister), cetak 30 buku (untuk penulis 10 buku, untuk ke Perpusnas, IKAPI dan dokumen di IRDH 10 buku dan Perpustakaan perguruan tinggi 10 buku)
   b. 10 Buku dikirim ke 5 (lima) perguruan tinggi negeri/swasta (Sasaran sesuai keinginan klien).
   c. Sesuai PAK (Penilaian Angka Kredit) DIKTI, buku minimal 40 halaman dan kertas A4 spasi 1,5.
   c. Penulis boleh lebih dari 3 orang & draft ke buku.irdh@gmail.com / cakti.gunawan@gmail.com
   d. Proses sejak draft masuk ke IRDH hingga penerbitan maksimal 4 (empat) minggu.
   e. DP 50% ke BNI a.n Cakti Indra Gunawan 0372579071, sisanya setelah buku siap kirim.
   f. Bila penulis ingin mencetak lagi/untuk dijual, maka harga per buku ditentukan sesuai kondisi buku.
   g. Sifat Lepas butuh, artinya IRDH tidak memasarkan di toko buku, hanya memasarkan di website www.irdhcenter.com (bila ada yang beli penulis akan diberi royalti 10 %).
   h. Bila klien ingin menitipkan ke toko buku se-Indonesia lewat toko buku Togamas minimal harus bayar cetak 300 buku, bila ingin dititipkan di Gramedia minimal cetak 1000 buku (royalti lgsung dengan toko buku tersebut)

2. **Membantu membuatkan buku 1.5 bulan (Klien belum ada draft)** – klien jika ada sediakan bahan dari laporan penelitian DIKTI, modul, bahan ajar, disertasi, thesis dll. **Biaya Rp. 20.000.000** (Isi buku 200-250 halaman, dengan minimal 50 sumber pustaka dari jurnal internasional, nasional dan buku dll).

3. **Publikasi jurnal internasional terindex Scopus Rp. 40.000.000 (TIDAK ADA DP) 6 – 12 bulan.**
4. **Publikasi jurnal internasional terindex DOAJ/COPERNICUS (DP 50%) Rp. 15.000.000 3- 6 bulan.**

5. **Mengundang pemateri strategi menulis buku ajar/referensi serta jurnal internasional oleh Cakti Indra Gunawan, Ph.D (Pemenang lomba Hibah buku DIKTI 2015 dan 2017). Biaya Rp. 5.000.000 per hari** (belum termasuk transportasi dan akomodasi untuk 2 orang yaitu pemateri dan staf IRDH)

DISKON Rp. 2juta DIBERIKAN KEPADA KLIEN UNTUK SEMUA HARGA DI ATAS, apabila order bulan Juli-September 2018 (walaupun draft belum ada/bisa menyusul draftnya) - DP 50% dulu.
Demikian tawaran ini, semoga bermanfaat untuk percepatan publikasi buku dan jurnal internasional dosen

Koordinator Program,

Wulita, S.E

Hubungi: IRDH Research & Publishing:
WA: 089621424412 / 085856511146
SMS/Telp. 085749547500 / 081357217319

Humanities

Literature, Linguistics, Art, History, etc

Scopus $925
Non Scopus
DOAJ $300 $400
COPERNECUS $275 $400

■ : Asia
■ : Eropa/Amerika

Education

Pedagogi, Instruction, Practice Development, etc.

Scopus $925
Non Scopus
DOAJ $300 $400
COPERNECUS $275 $400

■ : Asia
■ : Eropa/Amerika

Technology

Engineering, Energy, Automotive, Architecture, Building and Construction, etc

Scopus $990
Non Scopus
DOAJ $300 $400
COPERNECUS $275 $400

■ : Asia
■ : Eropa/Amerika

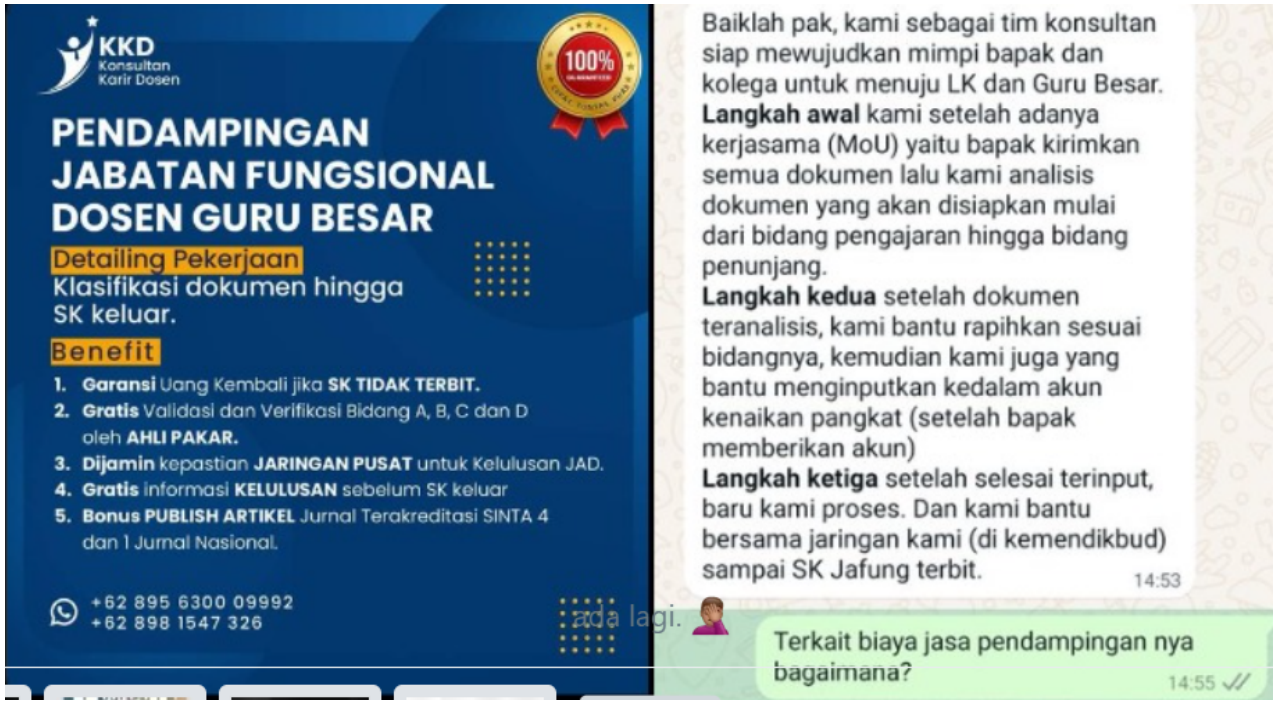
Exacta

Pharmology, Biologial Science, Chemestry, Health, Mathematic, etc

Scopus $990
Non Scopus
DOAJ $300 $400
COPERNECUS $275 $400

■ : Asia
■ : Eropa/Amerika

Bimbel jadi Professor tapi yang ngajarin bukan Profesor





Ada lebih dari 10 Bimbel seperti ini

Bimbel jadi Professor



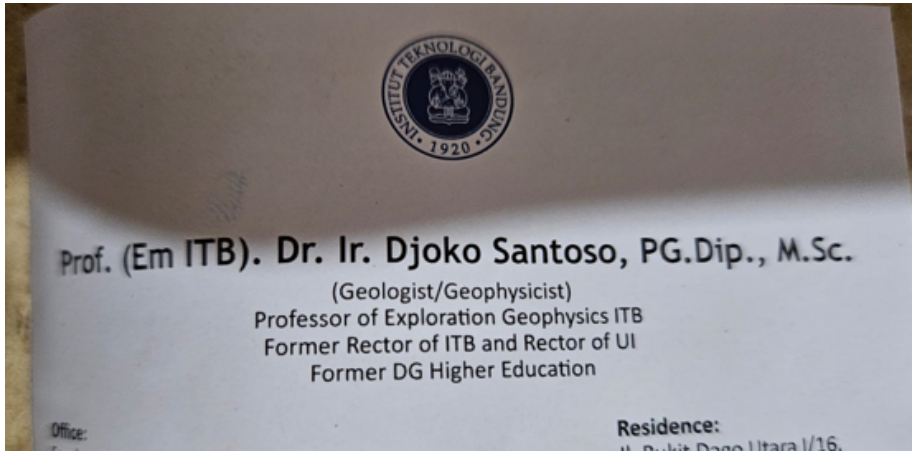


Etika Asesor



Kebijakan Karir Dosen ke Depan

1. Promosi dan Demosi jenjang jabatan dosen dari AA sampai ke Guru Besar dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang memenuhi Kriteria
2. Pemerintah akan menetapkan kuota Sertifikasi dan Tunjangan dari Pemerintah kepada Perguruan Tinggi bergantung pada kinerja PT, apabila PT memerlukan lebih dan mampu untuk membiayai maka PT dapat menetapkan Promosi Dosen sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan penilaian sesuai kriteria yang ditetapkan.
3. Tunjangan disalurkan ke Perguruan Tinggi, PT yang menetapkan penerima tunjangan selisihnya dibayarkan oleh PT





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Terima Kasih